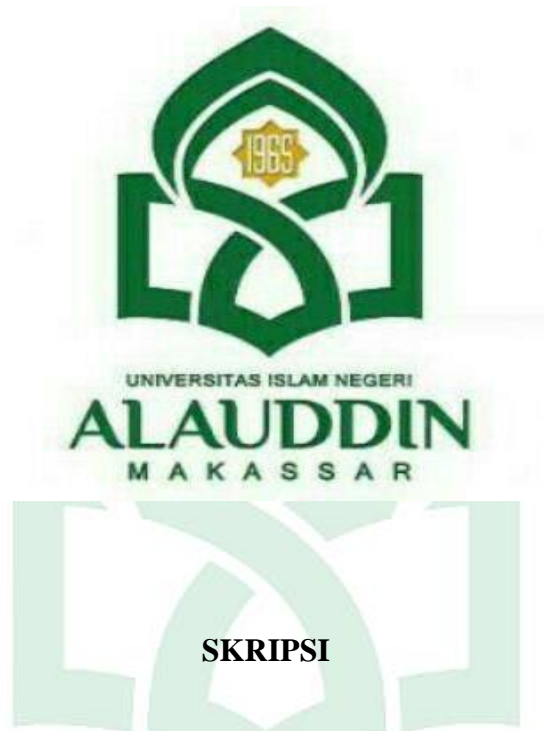


RELASI MODAL DAN KEKUASAAN POLITIK

(Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin – La Ntau
dalam Perhelatan Pilkada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Ilmu Politik

Oleh :

ADI JONI

NIM : 30600113152

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Joni

NIM : 30600113152

Tempat/Tgl. Lahir : Mawasangk, 22 Januari 1996

Prodi/Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik

Alamat : Lingkungan Katibu, Kel. Watolo, Kec. Mawasangka

Judul : Relasi Modal dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin – La Ntau Dalam Perhelatan Pilkada Buton Tengah Tahun 2017)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seutuhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 16 November 2020

Penyusun,

Adi Joni
NIM. 30600113152

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Relasi Modal dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin – La Ntau dalam Perbelatan Pilkada Buton Tengah Tahun 2017)", yang disusun oleh Adi Joni, NIM; 30600113152 mahasiswa Prodi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 6 Oktober 2020, bertepatan pada 19 Safar 1442 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S Sos) pada Prodi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alaudin Makassar.

Samata, 6 Oktober 2020
19 Safar 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag
Sekretaris : Nur Utaminingsih, S.IP., M.Si
Penguji I : Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si
Penguji II : Dra. Akilah Mahmud, M.Pd
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si
Pembimbing II : H. Achmad Abdi Amsir, S.IP., M.Si



Diketahui Oleh : Dekan Fakultas
Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar



Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I
NIP. 19711125 199703 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah Muhammad Saw. Beliaulah suri tauladan sejati yang telah menuntun peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmatan lil alamiin. Semoga keteladanan beliau menjadi inspirasi dan dasar bagi segala aktivitas keseharian kita. Aamiin.

Penulisan skripsi oleh mahasiswa dilakukan dalam rangka penyelesaian studi dan untuk memperoleh gelar sarjana. Begitu pula yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai upaya untuk memperoleh gelar sarjana program studi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Berawal dari penyusunan proposal penelitian, lalu melaksanakan penelitian hingga masuk pada tahap penyusunan hasil penelitian. Rangkaian proses panjang yang tidak mudah untuk dilewati, apalagi dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, tentunya telah menjadi hambatan serius dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi, atas andil dan dukungan moril serta tenaga dari banyak pihak terutama kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Latorongku dan Ibunda Wania, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan

penyusunan skripsi yang berjudul; **Relasi Modal dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin-La Ntau dalam Perhelatan Pilkada Buton Tengah Tahun 2017)**”, sebagaimana ada ditangan pembaca saat ini. Untuk itulah, dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat membantu baik secara langsung maupun tidak, antara lain:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, Selaku Rektor beserta Pembantu Rektor I, II, III, dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. Muhsin, M.Th.I, Selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Syahrir Karim, M.Si, P.hD, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Nur Utami Ningsyih, S.IP, M.Si, Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si, sebagai Pembimbing I dan H. Achmad Abdi Amsir, S.IP, M.Si, sebagai Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan dukungan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Para Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Semua informan yang telah bersedia menjadi narasumber penulis serta pihak-pihak terkait yang telah membantu.
7. Seluruh keluarga terkhusus adik-adikku Ludi, Salim, Lisna dan Putri yang selalu meminta agar saya lekas sarjana, juga kepada Lorna Ichnatun selaku teman, sahabat sekaligus pendamping yang tak henti-

hentinya memotivasi, mendukung dan membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

8. Saudara-saudari seperjuangan yang selalu setia dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini; Alan Balo, Ahmad Syahrulkan, Rafit, Ari, Alham, Dani, Taslim, Rahmat dan teman-teman IPO 9/10 yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu.
9. Teman-teman di Organisasi Daerah (Solidaritas Pelajar Mahasiswa Mawasangka Buton Tengah (SALIWU Makassar), tempat dimana saya belajar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan.
10. Kepada semua tempat dan orang-orang yang pernah penulis temui dimana pun dan kapan pun. Kalian semua telah menjadi bagian dari dialektika pemikiran penulis.

Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kesilapan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi sistematika penulisan sampai pada substansi pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat diharapkan datang dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini ke depan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samata, 19 Februari 2020

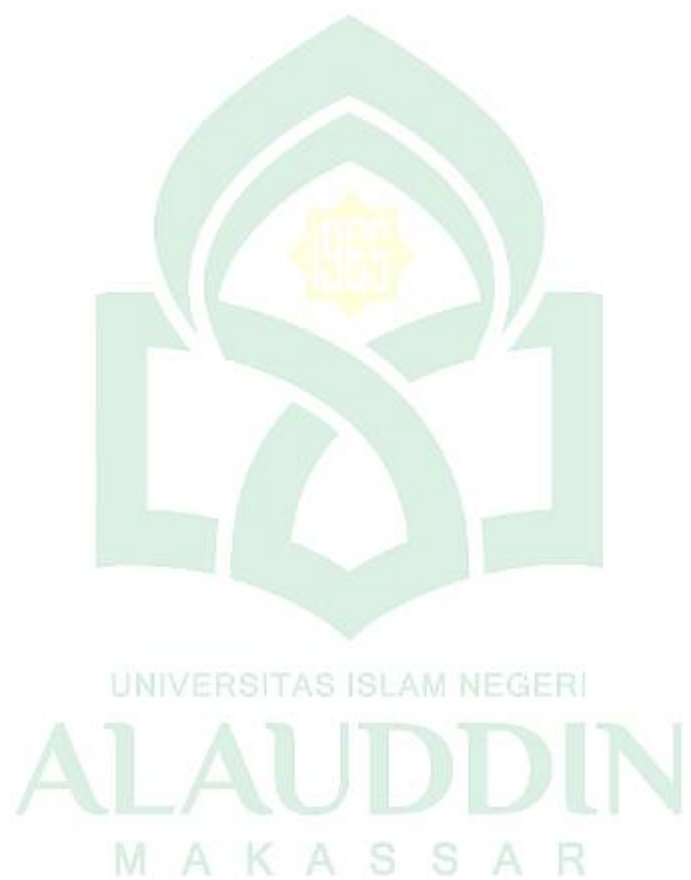
Penulis,

ADI JONI

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1-12 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 13-21 |
| A. Teori Modalitas | 13 |
| B. Teori Kekuasaan..... | 17 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 20 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 22-26 |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian | 22 |
| B. Fokus Penelitian | 23 |
| C. Pendekatan Penelitian | 23 |
| D. Sumber Data..... | 24 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 24 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 25 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 27-73 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 27 |
| B. Selayang Pandang Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih (Samahuddin-La Ntau)..... | 33 |
| C. Bentuk Modalitas Politik Yang Dimiliki Samahuddin-La Ntau | 39 |
| D. Upaya Samahuddin-La Ntau Memanfaatkan Modalitas Politik | 44 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| BAB V. KESIMPULAN..... | 74-75 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Implikasi Penelitian..... | 75 |



ABSTRAK

Nama : Adi Joni
Nim : 30600113152
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Relasi Modal dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin-La Ntau dalam Perhelatan Pilkada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017)

Penelitian ini mengkaji tentang relasi modal dan kekuasaan politik kaitannya dengan kemenangan pasangan calon Samahuddin-La Ntau dalam pilkada Buton Tengah tahun 2017. Fokus dan tujuan penelitian ini pada dasarnya menjurus kepada kepemilikan modalitas politik dan upaya yang dilakukan dalam memanfaatkan modalitas politik tersebut sehingga pasangan Samahuddin-La Ntau berhasil memenangkan pertarungan pilkada Buton Tengah tahun 2017 dengan telak.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan analisis deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari pasangan Samahuddin-La Ntau, Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Samahuddin-La Ntau, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pejabat Dinas, Masyarakat Nelayan, Pimpinan Cabang Partai. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara pengelolaan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan Samahuddin-La Ntau memiliki beberapa bentuk modalitas politik seperti modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik. Oleh karena modalitas politik tersebut, legitimasi kekuasaan yang diberikan oleh sebagian besar masyarakat kabupaten Buton Tengah terus tumbuh dan senantiasa berkembang. Didapati bahwa kecenderungan sikap dan politik masyarakat berdasarkan pada preferensi yang sama yaitu merasa dekat secara kultural dengan pasangan Samahuddin-La Ntau, merasa akrab secara sosial dan percaya terhadap kecakapan personal pasangan Samahuddin-La Ntau. Kecenderungan yang lahir akibat daya tarik kepemilikan modalitas politik ini kemudian berhasil dimanfaatkan oleh pasangan Samahuddin-La Ntau menjadi satu kekuatan politik dan pada akhirnya berhasil membawa mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah periode 2017-2022 mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap perkembangan diskursus ilmu politik terutama yang berkaitan dengan relasi modal dan legitimasi kekuasaan politik serta dapat memberikan inspirasi ide kepada peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton Tengah yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017, usai digelar dan menghasilkan nama Samahuddin – Lantau sebagai pasangan calon pemenang kontestasi dengan perolehan suara sebanyak 27.647 (57.85%), dibandingkan Mansur – Saleh yang hanya memperoleh suara 20.143 (42.15%). Sehingga melalui surat keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor:11/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor:37/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi termohon (KPU Buton Tengah) dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, dan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima, maka Samahuddin – La Ntau kemudian resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah periode 2017 hingga 2022 mendatang.

Selisih kemenangan yang cukup besar diperoleh pasangan calon Samahuddin – La Ntau di atas menunjukkan sesuatu yang menarik untuk ditelisik lebih jauh, kendati kemenangan tersebut tentunya melibatkan pengorganisasian berbagai jenis dan bentuk modalitas politik sebagai sumber kekuatan dalam menggalang sebesar – besarnya legitimasi dan meraih simpati dari konstituen. Keberhasilan dalam melakukan pengorganisasian modalitas politik semacam itu meniscayakan adanya suatu proses akumulasi kepercayaan yang terus menerus berlangsung hingga dapat meningkatkan elektabilitas seseorang. Kondisi tersebut

berlaku dalam segala level percaturan politik, baik itu dalam momentum Pilkada, Pileg, maupun dalam penentuan serta pengambilan kebijakan.

Jika dilihat, perwajahan kedua tokoh merupakan perpaduan antara dua entitas berbeda yakni kontraktor dan purnawirawan TNI. Sebagai kontraktor dengan berbagai pengalaman serta koneksi yang dimilikinya, lalu lahir dan besar di tengah – tengah realitas sosial dengan polarisasi tradisi, sistem kekerabatan dan soliditas kesukuan yang begitu kuat dan mengakar, telah memudahkan figur Samahuddin dalam mengkonsolidasikan diri di ranah struktural maupun kultural. Pada ranah struktural, Samahuddin berhasil membangun komunikasi dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak pemangku kebijakan maupun elite termasuk partai di antaranya adalah PDIP, PKB, NASDEM, PKS, PPP yang merapat sebagai partai koalisi pendukung. Dalam ranah kultural, ia didukung oleh lapisan masyarakat adat yang melembaga dalam kerukunan – kerukunan yang tersebar di berbagai kecamatan maupun di luar daerah.

Di sisi lain, La Ntau sebagai purnawirawan TNI sekaligus tokoh (pemuka) agama yang dipersonifikasi oleh masyarakat sebagai pribadi taat dan cukup bersih untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan, turut pula memberikan pengaruh signifikan terhadap meningkatnya simpul – simpul kekuatan yang tanpa disadari semakin kokoh dan menyebar secara sporadis dalam semua lapisan dari atas hingga masyarakat akar rumput. Kedudukan dan status sosialnya sebagai purnawirawan TNI bukan tanpa pengaruh, melainkan yang demikian itu juga mempertajam dan menguatkan ketokohnya di hadapan masyarakat sehingga legitimasi dari masyarakat terus terakumulasi.

Lebih jauh, sosok paslon dianggap representatif mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai kecamatan yang dengan ketat mengidentifikasi diri berdasarkan sentimen paguyuban dan keakaraban – keakraban lokalitas yang

secara basis memang memiliki potensi besar dalam hal mengupayakan akselerasi kemenangan melalui penjangkaran – penjangkaran sosial, relawan, partisipan dan sebagainya karena jumlah penduduknya yang banyak dibandingkan dengan kecamatan lain, ialah kecamatan Mawasangka bersandingan dengan Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur yang diwakili langsung oleh Samahuddin (calon bupati) dan kecamatan Gu serta Sangia – Wambulu yang diwakili oleh Lantau (calon wakil bupati). Selebihnya adalah kecamatan Talaga Raya dan Lakudo. Hasil rekapitulasi suara yang telah diplenokan KPU Kabupaten Buton Tengah mengkonfirmasi bahwa dari 7 kecamatan yang ada, 5 di antaranya seperti telah disebutkan berhasil dimenangkan oleh paslin Samahuddin – La Ntau.

Dalam situasi seperti itu, terlihat bahwa proses internalisasi pemahaman dan pengakuan masyarakat akan relasi sosial atau uperasaan bersamanya dengan paslon terjadi begitu erat seperti layaknya pencerminan satu sama lain, dimana keberadaan yang lain diakui sebagai bagian dari diri sendiri, begitu pun sebaliknya. Sehingga masyarakat memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada paslon. Hal ini kiranya menunjukkan betapa modal sosial yang mampu membentuk kesadaran relasional seperti itu sangat penting bagi akumulasi kekuasaan. Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa.

¹John F. Halliweel dalam bukunya *Social Capital and Prosocial Behaviour Sources of Well-Being* (2001:14) mengkaji klaim – klaim empirik tentang pentingnya modal sosial antara lain : pertama, modal sosial selalu penting untuk pengembangan kapital manusia dan kedua, modal sosial dapat menggerakkan individu untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

¹ Irene Ria dkk, *Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemenangan Caleg Pasca Pindah Dapil pada Pileg Kota Surabaya Tahun 2014*. (Jurnal Fak. Sospol Universitas Udayana), h. 5 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/articel/download/37666//22852> (diakses 27 Mei 2019)

Praktis, keterpilihan Samahuddin – La Ntau menjadi relevan untuk menjustifikasi persinggungan antara kekuasaan seseorang dengan modalitas politik yang dimilikinya. Perbincangan mengenai kekuasaan amatlah penting menghubungkannya dengan term modalitas berpolitik. Hal itu bermakna bahwa ketika ingin mengonfirmasi dari mana sumber dan legitimasi kekuasaan yang dimiliki seseorang, kelompok atau lembaga sosial tertentu maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian modalitas – modalitas politik berusaha dikelola dan dikonversi sedemikian rupa sehingga menghasilkan kekuasaan. Dengan kata lain, semakin besar modalitas politik yang dimiliki maka semakin besar pula peluang kekuasaan yang diperoleh. Modalitas politik yang dimaksud berkaitan dengan segala bentuk kualifikasi sumberdaya yang dapat mengantarkan seseorang kepada kekuasaan bisa berupa modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik.

Relasi kekuasaan yang diaktifasi dengan modal akan melahirkan kategori – kategori modal, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Jenis modal yang pertama (ekonomi) mencakup alat – alat produksi (mesin, tanah, buruh) materi (pendapatan benda – benda), serta uang. Kedua, modal budaya berkaitan dengan keseluruhan kualifikasi intelektual berupa aspek logika, etika, maupun estetika. Ketiga, modal sosial yakni jejaring sosial sebagai sumber penentuan kedudukan sosial. Yang terakhir adalah modal simbolik seperti jabatan, kantor, prestise, status sosial dan sebagainya. Modal simbolik memiliki kekuatan mengkontruksi realitas, mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas. Semua jenis modal

di atas mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari generasi ke generasi.²

Modal dipandang sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis – jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan ‘versi dua sosial yang resmi’.³

Kaitannya dengan modal, Bourdieu mengistilahkan *field* sebagai sebuah arena pertarungan. Struktur *field*-lah yang menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. *Field* adalah sejenis pasar kompetisi dimana berbagai jenis kapital (ekonomi, kultur, sosial, simbolik) digunakan dan disebar. Lingkungan adalah lingkungan politik (kekuasaan) yang sangat penting; hirarki hubungan kekuasaan di dalam lingkungan politik membantu menata semua lingkungan yang lain. Dengan kata lain, *field* adalah wilayah kehidupan sosial, seperti seni, industri, hukum dan politik tempat para pelakunya berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan status.

²Abdul Halim. *Politik Lokal (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, (Jakarta : LP2B, 2014), h. 109-110.

³ Nurhadi. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, (Bantul : Kreasi Wacana, 2016), h. 28

Dalam perspektif Bourdieu, ada empat kapital yang berperan dalam masyarakat yang menentukan kekuasaan sosial dan ketidaksetaraan sosial. Keempat kapital itu adalah pertama kapital ekonomi yang menunjukkan sumber ekonomi. Kedua, kapital sosial yang berupa hubungan sosial yang memungkinkan seseorang bermobilisasi demi kepentingan sendiri. Ketiga, kapital simbolik yang berasal dari kehormatan dan prestise seseorang dan keempat adalah kapital budaya yang memiliki berapa dimensi, yaitu : pengetahuan objektif tentang seni dan budaya, cita rasa budaya dan preferensi, kualifikasi formal (seperti gelar – gelar universitas) dan kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis, kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.⁴

Dalam pemikiran islam, dinamika dan sumber utama daripada kekuasaan juga diakui dan sangat dijunjung tinggi keberadaannya. Kekuasaan dalam konteks ini menyangkut proses internalisasi pemahaman umat muslim yang tidak boleh terlepas dari tendensi ketuhanan sebagai sumber awal dan segala – galanya sekaligus tempat terakhir kembalinya kekuasaan. Sebagaimana disinyalir dalam firman Allah swt. QS. Al-Imran/3:26, yakni:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan

⁴Sarip Hidayat, *Teori Sosial Bourdieu dan Sumbangannya Terhadap Penelitian Sastra*, Jurnal Pendidikan Sastra, Vol. 3 No. 1 (2010), h. 47 [http://ejurnalbalaibahasa.id /index.php/metasastra/](http://ejurnalbalaibahasa.id/index.php/metasastra/). (diakses 20 Mei 2019)

Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁵

Sehingga dapat diketahui terjadi polarisasi keyakinan yang sangat kuat dalam bangunan dan corak berpikir umat muslim, dimana selanjutnya itu akan memperngaruhi perilakunya saat menyikapi berbagai hal seputar kekuasaan. Selain itu, proses legitimasi kekuasaan yang mengharuskan kepatuhan seseorang, kelompok masyarakat kepada penguasa atau pemimpin mereka, juga ditegaskan dalam firman Allah swt. QS Shaad/38:26, yang berbunyi :

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁶

Selanjutnya mengenai kekuasaan seseorang yang juga dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar r.a yakni :

بَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَّ اِنَّهَا اَمَانَةٌ وَّ اِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَزِيْ وَّ نَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيْهَا

Terjemahnya:

“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu.”⁷

⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004), h. 70

⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 142

⁷ Muslim bin al-Hajjal al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits : Shahih Muslim 2* (Jakarta: Almahira, 2012), nomor 1825

Atas dasar itulah, tak mengherankan jika kemudian islam mengakui adanya kekuasaan dan membangun konsepsi yang meskipun berbeda dari bangunan teori pada umumnya yakni mengakui adanya kekuasaan transendental sebagai sumber utama dan segala – galanya kekuasaan, tetapi tetap saja bahwa islam juga memberikan perhatian kepada para pemimpin dan umat dengan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melakukan kebaikan – kebaikan dan memerangi kemungkaran seperti sejatinya seorang pemimpin yang sudah ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan, sumber serta legitimasinya amat dipersoalkan karena keberadaannya dianggap sangat penting baik itu dalam kerangka teori modern maupun dalam islam sendiri.

Melihat relasi kuasa yang terbangun begitu kuatnya yang meliputi kemenangan paslon Samahuddin – La Ntau seperti dijelaskan sebelumnya mengisyaratkan berbagai hal yang merujuk pada polarisasi modal – modal yang kemudian berhasil dikonversi (dikelola) menjadi satu kekuatan politik dan pada akhirnya berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Buton Tengah dengan telak. Sehingga berangkat dari berbagai kecenderungan itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti perihal *“Relasi Modal dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Paslon Samahuddin – La Ntau dalam Perhelatan Pilkada Kabupaten Buton Tengah 2017)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk modalitas politik yang dimiliki Samahuddin – Lantau ?
2. Bagaimana upaya paslon Samahuddin-La Ntau dalam mengkonsolidasikan modalitas politik yang dimiliki sehingga berhasil memenangkan Pilkada Buton Tengah 2017 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “*Relasi Modal dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Paslon Samahuddin – Lantau dalam Perhelatan Pilkada Buton Tengah 2017)*” adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk modalitas politik yang dimiliki Samahuddin – La Ntau
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya paslon Samahuddin – La Ntau dalam mengkonsolidasikan modalitas politik yang dimiliki sehingga berhasil memenangkan Pilkada Buton Tengah 2017

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan dalam menyelami wacana modal dan kekuasaan politik kaitannya dengan proses demokratisasi lokal.
- b. Secara praksis, penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan kemajuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Fadil Rahmat Irfani dalam skripsinya yang berjudul “Modalitas Kekuasaan (Studi Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo)”, menemukan fenomena dimana modalitas politik dalam hal ini modal sosial sangat berpengaruh dalam menentukan kedudukan atau status sosial seseorang. Selain itu juga, modal sosial dalam politik mampu menggiring opini dan sikap politik masyarakat. Hal itu tergambarkan dalam kepemimpinan kepala desa Wage, dengan modal berjiwa sosial, merakyat, aktif dalam kegiatan – kegiatan masyarakat, berbaur dalam kehidupan sehari – hari, jujur dan sebagainya, ia telah berhasil memperoleh kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat

sehingga dirinya dipercayakan dan diberi mandat untuk memimpin masyarakat desa Wage selama 2 periode. Dikarenakan modal sosial itu pula, respon konstruktif dari masyarakat terhadap kepemimpinannya selalu positif.⁸

Ibnu Khaldun, dalam skripsinya yang berjudul “Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni – Muh. Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015), menjelaskan perjalanan panjang dan rentetan karir Aras Tammauni sebagai kepala desa Tobadak selama 26 tahun kemudian menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi Bupati Mamuju Tengah, itu tidak terlepas dari keberhasilannya mengkonversi modal – modal yang ia miliki baik itu modal ekonomi, modal sosial maupun modal simbolik. Keberhasilan tersebut membuat Aras Tammauni begitu berkuasa dan mendominasi kancah perpolitikan di Mamuju Tengah. Ia mampu membentuk jejaring, melakukan kontrol sosial serta memiliki kuasa yang besar terhadap lembaga dan sumber daya negara secara signifikan. Dalam perhelatan Pilkada Mamuju tahun 2015, ia berhasil memenangkan pertarungan dengan capaian atau perolehan suara yang terbilang cukup fenomenal hingga 97.69%.⁹

Muhammad Aedil Akbar dalam skripsinya “Elit Berkuasa dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Kuasa antara Pemerintah Takalar dengan Karaeng Galesong), mengemukakan bahwa eksistensi Karaeng Galesong sebagai satu simbol kearifan lokal tidaklah hilang dari kehidupan masyarakat modern sekarang. Memang secara prosedural, karaeng Galesong tidak menempati posisi strategis dalam pemerintahan tetapi tetap saja bahwa fatwa – fatwa yang

⁸ Fadil Rahmat Irfani, *Modalitas Kekuasaan (Studi Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo)*, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sebuah Skripsi.

⁹ Ibnu Khaldun, *Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni – Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah, 2015)*, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sebuah Skripsi.

dikeluarkannya masih didengan dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Pemeliharaan dan pelestarian terhadap unsur – unsur kearifan lokal seperti tergambar di atas merupakan satu contoh bagaimana polarisasi tradisi kemudian menjadi penting diperhatikan, kecenderungan masyarakat seperti itu bisa diupayakan dan dikonversikan menjadi modalitas politik yang seterusnya bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang, membangun jejaring, menguatkan posisi dan sebagainya. Seperti yang tercermin dalam relasi yang baik Karaeng Galesong dan pemerintah Kabupaten Takalar di setiap periodenya.¹⁰

Ahmad Nurcholis, dalam skripsinya yang berjudul “Orang Kuat dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus : Kekuasaan Politik Fuad Amin di Bangkalan)”, menjelaskan hubungan orang kuat lokal dengan terjadinya monopoli kekuasaan politik yang dilakukan oleh Fuad Amin. Kecenderungan itu menimbulkan banyak penyimpangan dan melahirkan pemerintahan model dinasti dengan menempatkan beberapa kroni dan keluarganya dalam pos strategis pemerintahan. Dampak lainnya adalah kerap kali terjadi korupsi anggaran negara dan memonopoli berbagai sumber ekonomi strategis. Hal lain yang menarik adalah ternyata sumber awal kekuasaan Fuad Amin itu sebagaimana dijelaskan yakni posisinya yang mewarisi modal kultural sebagai elit keturunan kiai terkemuka di satu sisi, serta kedekatannya dengan dunia blater di sisi lain. Selain itu, Fuad juga memiliki modal ekonomi sebagai pengusaha dengan kepemilikan harta yang melimpah. Modal – modal itu kemudian mempermudah dirinya untuk melenggang maju ke sektor politik formal. Keberhasilan ini juga ditopang oleh kultur masyarakat yang masih memegang teguh budaya patrimonial, sehingga

¹⁰ Muhammad Aedil Akbar, *Elit Berkuasa dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Kuasa antara Pemerintah Takalar dengan Karaeng Galesong)*, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sebuah Skripsi

ketergantungan masyarakat kepada kekuatan parton (Fuad Amin) masih sangat kental.¹¹



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Modalitas

Teori modalitas politik dalam maknanya yang eksplisit pertama kali dilansir oleh Bourdieu, ia seorang tokoh sosiologi Prancis yang menyatakan bahwa kekuasaan seseorang dalam masyarakat erat kaitannya dengan modal (modal – modal) serta komposisi dan akumulasi dari modal – modal yang dimiliki tersebut. Komposisi dan akumulasi ini menjadi sangat penting karena kebernilaian dan bobot suatu modal berbeda – beda tergantung (ditentukan oleh) medan – medan sosial yang melingkupi, serta posisi posisi pemilik dan penggunaannya. Modal dapat dipertukarkan antara modal yang satu dan modal yang lainnya.

¹¹Ahmad Nurcholis, *Orang Kuat dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus : Kekuasaan Politik Fuad Amin di Bangkalan)*, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sebuah Skripsi.

Konsepsi atas teori modal Bourdieu tidak bisa dilepaskan dari konsep dominasi lainnya. Sehingga pemikiran Bourdieu ini ada keterkaitan dengan konsep kekuasaan yang lain, yakni habitus dan ranah (Arena). Habitus dalam teori sosiologi dimaksudkan sebagai struktur mental kognitif yang menghubungkan manusia dengan dunia sosial. Manusia dianggap dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang digunakan untuk melahirkan persepsi, pemahaman, apresiasi dan evaluasi atau kemampuan menilai terhadap dunia sosial.

Dalam suatu ranah ada pertarungan, kekuatan – kekuatan serta orang yang memiliki banyak modal dan orang yang tidak memiliki modal. Di dalam ranah, “pertarungan” sosial selalu terjadi. Siapa saja yang memiliki modal dan habitus yang sama dengan kebanyakan individu akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki modal. Artinya modal disini menjadi instrumen penting dalam pelestarian kekuasaan politik.¹²

1. Modal Ekonomi

Model ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudah di konversikan ke dalam bentuk - bentuk modal lainnya. Modal ekonomi ini mencakup alat – alat produksi (mesin, tanah, buruh) materi (pendapatan dan benda – benda) dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lebih lanjut, Firmansyah mengkategorisasikan lebih jelas bahwa modal ekonomi yang nampak adalah uang. Modal uang digunakan untuk membiayai kampanye. Masing – masing partai/politisi berusaha untuk meyakinkan publik bahwa partai/politisi

¹² Richard Harker, dkk, (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2009), h.xx

tersebut adalah yang lebih peduli, empati, memahami benar persoalan bangsa dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Salurannya adalah melalui media promosi, seperti TV, lobi ke oramas, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik dan pengumpulan massa, semuanya itu membutuhkan dana yang besar.¹³

Sebenarnya modal ekonomi ini adalah tradisi Marxian. Bentuk – bentuk modal didefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi. Konsepsi Marxian tentang modal dianggap terlalu menyempitkan pandangan atas gerak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun Bourdieu tetap menganggap penting modal ekonomi, yang di antaranya adalah alat – alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan dan benda – benda), dan uang. Modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif lebih independen dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranah – ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain.¹⁴

2. Modal Kultural

Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda – benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana). Contoh lain modal kultural adalah kemampuan menulis, cara pembawaan dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Dengan demikian modal kultural merupakan

¹³ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 4

¹⁴ Nanang Krisdinanto, “*Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai*”, Jurnal KANAL, Vol. 2 No. 2 (Maret 2016), h. 203. <http://digilib.uinsby.ac.id/15436/5/Bab%202.pdf> (diakses 28 Mei 2019)

representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek logika, etika, maupun estika. Atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai modal yang berdasar pada pengetahuan yang dilegitimasi.¹⁵

Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan akan nilai – nilai (*values*) mengenai segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya untuk mengaktualisasikannya. Modal kultural tidak dengan sendirinya teraktualisasikan dalam realita yang bermanfaat bagi orang yang meyakiniinya, dan atau masyarakat pada umumnya. Mirip dengan kemanfaatan modal sosial, modal kultural dapat berhenti sebagai mutiara terpendam yang tidak memberikan manfaat apapun. Kemampuan dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk memelihara, melestarikan, memperbaharui, dan memanfaatkannya.¹⁶

3. *Modal Sosial*

Modal sosial merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya yang digunakan untuk investasi, disebut dengan modal. Modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial disini tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang. Misalnya pada kelompok dan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan dengan dukungan sumberdaya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks hubungan sosial, eksistensi dari ketiga modal (modal sosial, modal ekonomi, modal budaya)

¹⁵Abdul Halim, *Politik Lokal (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung)*, (Jakarta : LP2B,2014) h. 110

¹⁶Sumarno, dkk, “*Orientasi Modal Sosial dan Modal Kultural di Fakultas Ilmu Pendidikan U.N.Y*”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 2 (September, 2013), h. 70

tersebut merupakan garansi dari kuatnya ikatan hubungan sosial.¹⁷ Kemanfaatan modal sosial juga sangat bergantung pada cara – cara yang diupayakan untuk melestarikan, memelihara, memperkuat, memperbaharui bila dimungkinkan, dan mendayagunakannya. Salah urus atau penyalahgunaan terhadap modal sosial, akan menghasilkan kerugian dan dampak negatif lainnya. Sebaliknya, pengurusan yang tepat, pengelolaan yang benar, akan menghasilkan energi positif bagi berbagai pihak.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol – simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik disini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional maupun non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui, mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.¹⁸

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengetahuan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa

¹⁷John Field, *Terj. Modal Sosial* (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2010), h. 16

¹⁸Abdul Halim, *Politik Lokal (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, (Jakarta : LP2B,2014) h. 111

kantor yang luas di daerah yang mahal, mobil dengan supirnya, namun bisa juga petunjuk – petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya.¹⁹

B. Teori Kekuasaan

Pada dasarnya kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber – sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sumber – sumber tersebut bisa berupa media massa, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat atau pun militer. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan – keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan – tindakan pihak lain. Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian – pengertian kekuasaan dan wewenang.

Secara etimologi kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yang berarti power yang memiliki makna kemampuan berbuat dan bertindak. Menurut Dahl power identik dengan *influence, authority dan rule*. Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan orang lain bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan itu. Pengertian disini harus meliputi

¹⁹ Haryatmoko, “Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu : Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa”, Jurnal/Majalah BASIS, No. 11-12 (November-Desember 2003), 43-45

untuk membuat keputusan untuk mempengaruhi orang lain dan mengatasi pelaksanaan keputusan itu. Kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta keterampilan dalam menentukan macam kekuasaan untuk merespon tuntutan situasi.²⁰

Miriam Budiardjo, mengutarakan beberapa pendapat ahli mengenai kekuasaan antara lain :

1. Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar dari kemampuan ini.
2. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok orang lain ke arah tujuan dari pihak pertama.
3. Talcott Parson, kekuasaan adalah kemampuan untuk menjain terlaksananya kewajiban – kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan – kesatuan dalam sistem organisasi kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi – sanksi dianggap wajar terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Kekuasaan erat kaitannya dengan dengan konsep wewenang dan legitimasi. Wewenang digambarkan sebagai sebuah kekuasaan yang dilembagakan, sementara legitimasi merujuk pada keyakinan anggota – anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Dalam praktek politik, soal wewenang dan

²⁰M. Alfian Alfian, Menjadi Pemimpin Politik : Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 223

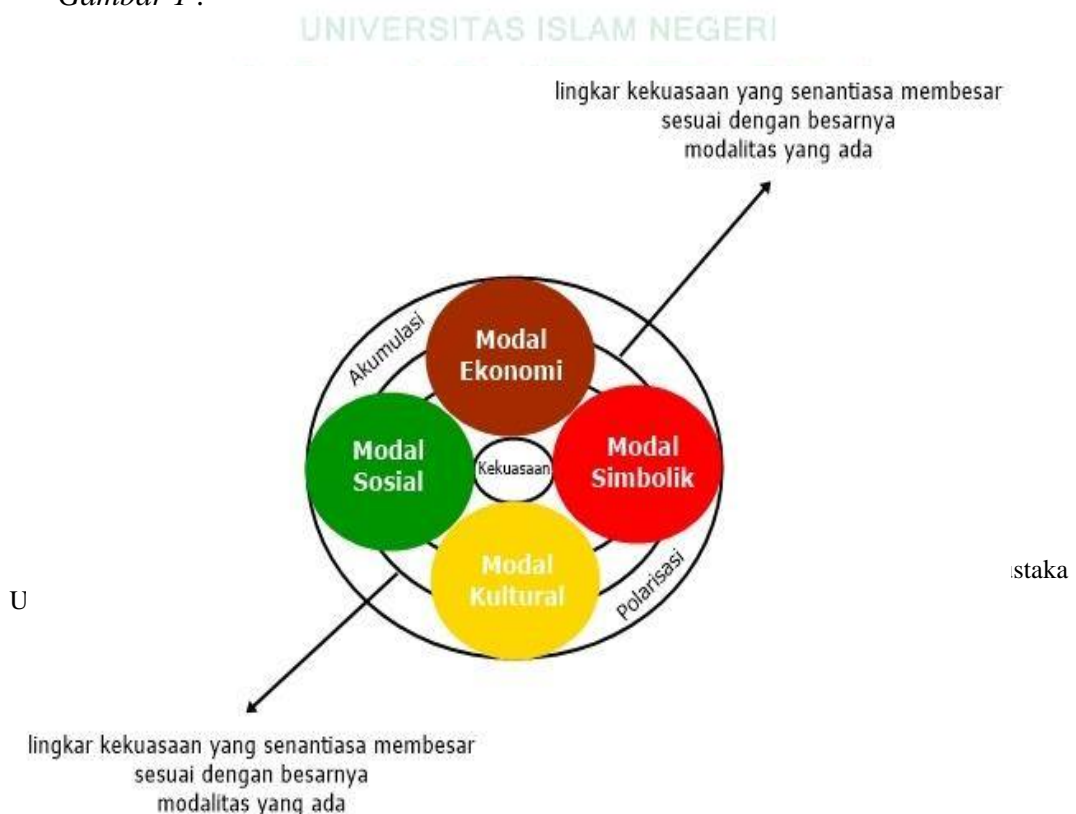
legitimasi menjadi bagian integral yang harus dimanifestasikan secara bersama – sama agar seseorang atau kelompok dapat memperoleh kekuasaan, menjalankan serta mempertahankannya.

Max Weber membagi tiga macam wewenang yaitu tradisional, kharismatik dan legal-rasional. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat terhadap tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Wewenang legal-rasional berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukan orangnya tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah-lakunya.²¹

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mudah mengikuti dan memahami alur pembahasan dan proposal ini, berikut diterangkan kerangka konsep atau skema pemikiran yang dibuat dalam bentuk gambar ilustratif sebagai berikut :

Gambar 1 :



Penjelasan gambar : Beberapa modal yang ditandai dengan varian warna di atas merupakan berbagai kategori modal yang dalam pengertian politik, memiliki fungsi yang sama sebagai sumber legitimasi daripada kekuasaan dan masing-masing modal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hal itu bermakna bahwa pada dasarnya modal – modal itu sangat penting bagi tumbuh – kembangnya dan dapat menopang serta mensolidkan kekuatan atau kekuasaan seseorang, kelompok atau lembaga yang memilikinya. Semakin besar modalitas politik yang dimiliki semakin besar pula kekuasaan yang bisa diperoleh seperti yang terlihat dalam gambar di atas. Lingkaran kekuasaan politik menjadi lebih besar dan akan semakin membesar jika berhasil menghimpun atau mengkonversi sebanyak – banyaknya berbagai modalitas yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ilmiah karena penelitian itu menyangkut aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat data. Sakaran, mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman secara mendalam atas suatu masalah. John Creswell, mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah, setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan/bacaan kepustakaan. Sesudah itu menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Penelitian berpuncak pada pelaporan hasil penelitian.²²

Dalam proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan asumsi dasar bahwa pendekatan kualitatif akan membawa penulis menyelami fenomena secara lebih kompleks dan mendalam. Hal itu sebagaimana diterangkan Sarwono dalam bukunya (*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2006). Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas masalah yang ada dalam interaksi manusia. Sasaran utama penelitian kualitatif adalah manusia karena manusialah sumber masalah dan

²²J.r. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 6

penyelesai masalah. Sekali pun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya membatasi diri pada persoalan manusia saja. Sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, benda artefak dan sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.²³

Adapun rancangan lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Buton Tengah.

2. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada modalitas politik yang dimiliki paslon Samahuddin – La Ntau dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengkonsolidasikan modalitas politik tersebut sehingga berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Buton Tengah tahun 2017.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani “*Phaeno*” yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. *Logos* ilmu atau ucapan. Dengan demikian, fenomenologi dapat diartikan ilmu tentang fenomena yang menampakkan diri dari kesadaran peneliti. Fenomenologi merupakan sesuatu yang hadir dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu menjadi tampak dan nyata. Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami dan menafsirkan arti fenomena. Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan bahwa fenomenologi merupakan suatu tipe atau jenis penelitian

²³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 193

kualitatif yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.²⁴

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yang diperoleh langsung dari proses observasi, wawancara dengan informan terkait dan pengumpulan dokumen yang diperoleh di lapangan.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari literatur dan kajian kepustakaan berupa laporan – laporan penelitian, skripsi, buku, media dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara observasi dan wawancara. Dalam hal tertentu penulis juga mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian ini.

a.) Observasi

Kecenderungan sikap dan pilihan politik masyarakat menjadi tumpuan observasi penelitian ini. Penulis melihat terjadi polarisasi yang begitu kuat, dimana kepercayaan masyarakat tumbuh dan senantiasa berkembang disebabkan oleh kesamaan preferensi di antara mereka. Masyarakat merasa dekat secara kultural dengan paslon, akrab secara sosial, merasa percaya terhadap kecakapan kualifikasi personal pasangan calon Samahuddin-La Ntau. Sehingga mayoritas masyarakat sepenuhnya memberikan dukungan dan politik mereka kepada paslon.

b.) Wawancara

Penulis telah memilih dan mewawancarai informan secara random atau acak sebanyak sebelas orang dari berbagai latar belakang yang berbeda antara lain

²⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 351

pasangan Samahuddin-La Ntau itu sendiri, H. Gani selaku ketua tim pemenangan SAMATAU skala kabupaten, Kadir Teme selaku pimpinan cabang partai PDI-P, Mutalib selaku pimpinan cabang partai PKB, pensiunan dinas berinisil “H”, La Uzuni (tokoh agama kecamatan Sangia Wambulu), Bototo (tokoh adat sekaligus ketua kerukunan keluarga wasilomata), “AF” ketua tim relawan pemuda SAMATAU, Zaba (tokoh pemuda masyarakat Gu), Lakarambau (nelayan kecamatan Mawasangka).

6. Teknik Analisis Data

a.) Reduksi Data

Berawal dari identifikasi topik atau perumusan masalah penelitian, penulis dalam penelitian ini kemudian memilih dan memfokuskan permasalahan pada bagaimana kerja modalitas politik dalam membentuk sebuah kekuasaan. Tentu hal itu berkaitan dengan prosesi pemilihan kepala daerah, khususnya yang diselenggarakan di Kabupaten Buton Tengah 2017 lalu, dimana paslon Samahuddin – Lantau yang memenangkan pertarungan disinyalir telah berhasil mengkonsolidasikan dengan baik dan maksimal modalitas politik yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini, data akan dikategorisasi dan diorganisir secara spesifik pada hal – hal yang hanya berkaitan dengan term modalitas yang dimiliki paslon seperti modal ekonomi, sosial, modal kultural dan modal simbolik.

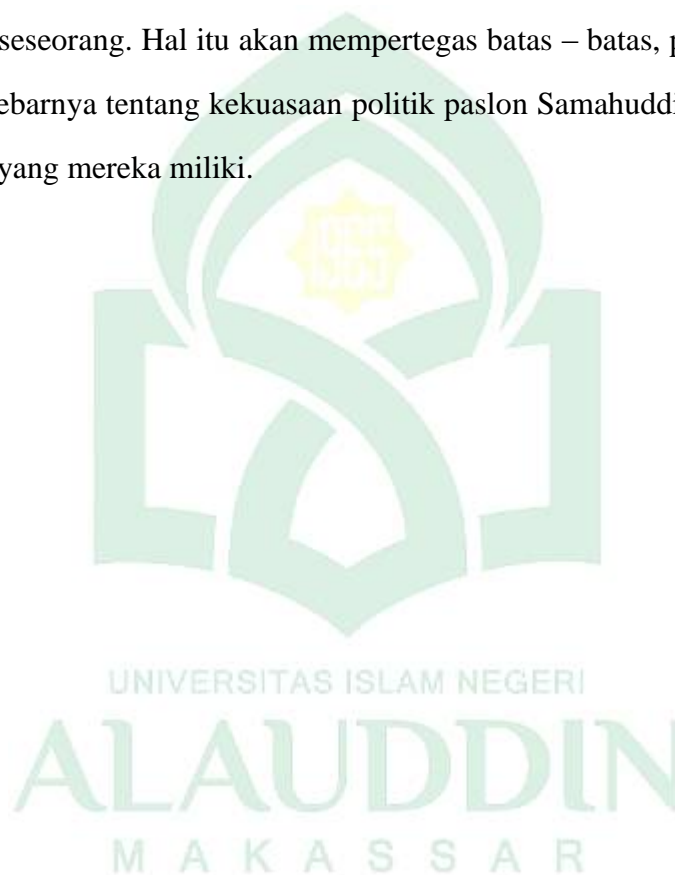
b.) Penyajian Data

Data dalam penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan tentang bagaimana proses polarisasi modal – modal politik yang dimiliki paslon Samahuddin – Lantau, menyajikan berbagai hubungan antara modal – modal tersebut, upaya yang dilakukan dalam

mensolidkan modal – modal politik itu sampai pada akhirnya data menjadi objektif sebagai sebuah penelitian ilmiah.

c.) Verifikasi Data

Langkah terakhir dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam proses ini penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dan memutuskan sejauh mana keterhubungan antara modal politik dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Hal itu akan mempertegas batas – batas, pola – pola, dan hubungan sebenarnya tentang kekuasaan politik paslon Samahuddin – Lantau dan modal politik yang mereka miliki.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Buton Tengah

Daerah Buton Tengah merupakan bekas wilayah Kerajaan dan Kesultanan Buton yang telah eksis sejak zaman dulu. Pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6 dan juga Sultan Buton ke-1 bernama Murhum, rakyat Gu dan Mawasangka diriwayatkan patuh dan setia kepadanya. Ikatan emosional Gu dan Mawasangka terhadap Buton semakin kuat setelah Murhum berhasil membela negeri mereka. Ketika kembali ke Buton, Murhum turut membawa “syara-pancana” dan kemudian Gu dan Mawasangka diberinya nama “Paincana” selaku tanda kemenangan Murhum. Nama ini kemudian lekat untuk menggambarkan kedua etnis di Buton Tengah tersebut dengan sebutan pancana atau pancano.

Keberadaan Buton Tengah juga tertuang pada Undang-Undang Murtabat Tujuh (sekitar tahun 1610), yakni undang-undang Kesultanan Buton pada masa Sultan Buton ke-4, La Elangi (Sultan Dayanu Ikhsanuddin). Disebutkan bahwa Kesultanan Buton terdiri atas 72 kadie yang diduduki oleh 30 menteri dan 40 bobato. Sedangkan sisanya menandakan kaum yang memegang pemerintahan di pusat. Dari 70 bagian tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian besar yakni Pale Matanayo dan Pale Sukanayo. Lakina Lakudo, mengepalai wilayah Kadolo, Lawa, Tangana-lipu, Tongkuno, Gu, Wongko Lakudo, dan Wanepa-nepa (Distrik Gu). Lakina Bombonawulu menduduki wilayah Bombonawulu-kota, Rahia, Wakea-kea, Uncume, Wongko-bombonawulu (Distrik Gu). Kedua lakina tersebut merupakan kadie di wilayah Pale Matanayo.²⁵

²⁵ Muhammad Jadul Maulana, dkk. *Kesepakatan Tanah Wolio (Ideologi Khebinekaan dan Eksistensis Budaya Bahari di Buton)*, (Bau-bau: Titian Budaya, 2011), h. 7

Di wilayah Pale Sukanayo, Menteri Peropa mengepalai beberapa wilayah salah satunya Ballo di Distrik Kabaena (termasuk wilayah Talaga saat ini), Menteri Gundu-Gundu mengepalai Kooe dan Kantolobea (Distrik Mawasangka), Menteri Melai mengepalai Boneoge (Distrik Gu), Menteri Lanto di Lalibo (Distrik Mawasangka), Menteri Wajo di Wajo (Distrik Gu), Menteri Tanailandu di Wasindooi (Distrik Mawasangka). Selanjutnya Lakina Boneoge di Boneoge, Madongka, Tanga, dan Matanayo (Distrik Gu), Lakina Baruta di Baruta (Distrik Gu), Lakina Mone di Lambale dan Wakuru (Distrik Gu), Lakina Lolibu di Lipumalangan II dan Tongkuno (Distrik Gu), dan Lakina Inulu di Lamena, Lagili, dan Wakengku (Distrik Mawasangka). Dalam undang-undang kesultanan juga disebutkan Tamburu Limaanguana. Tamburu Limaanguana yaitu pasukan kehormatan sultan yang terdiri atas lima kelompok yang masing-masing kelompok memiliki nama sendiri-sendiri, salah satunya Mawasangka.²⁶

Kabupaten Buton Tengah atau disingkat Buteng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibukotanya berada di Labungkari, Kecamatan Lakudo. Buton Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton yang disahkan pada pertengahan tahun 2014 bersama Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat. Ketiga daerah otonomi baru tersebut disahkan menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Salah satu alasan pemekaran wilayah ini adalah karena permasalahan akses. Seluruh wilayah Buton Tengah tidak berada di Pulau Buton, sedangkan ibukota Kabupaten Buton berada di Pasarwajo. Pelayanan dan kontrol membutuhkan biaya dan waktu yang panjang karena harus melewati laut menuju Kota Baubau, lalu dilanjutkan perjalanan darat menuju Pasarwajo di ujung timur Pulau Buton.

²⁶ Muhammad Jadul Maulana, dkk. *Kesepakatan Tanah Wolio (Ideologi Khebinekaan dan Eksistensi Budaya Bahari di Buton)*, h. 11

3. Letak Geografis Kabupaten Buton Tengah

Kabupaten Buton Tengah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang sebagian wilayahnya berada di Pulau Muna sebagian lainnya kepulauan Talaga dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara $4,96^{\circ}$ - $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur di antara $122,00^{\circ}$ - $123,34^{\circ}$ Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton Tengah.²⁷

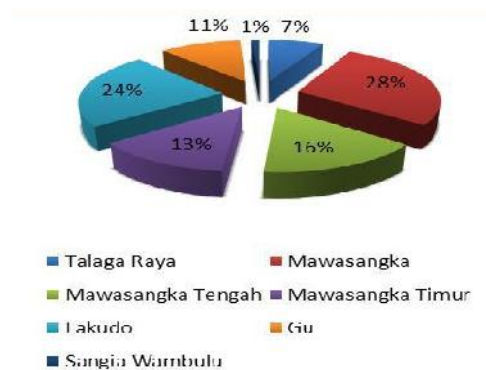
Kabupaten Buton Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Bau-Bau dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana. Kabupaten Buton Tengah memiliki wilayah daratan seluas $\pm 958,31$ km², Kabupaten Buton Tengah terdiri dari tujuh kecamatan yaitu: Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Gu, Kecamatan Sangia Wambulu. Dari tujuh kecamatan tersebut semua berada pada wilayah daratan yang sama, kecuali kecamatan Talaga Raya, letaknya di seberang pulau Buton Tengah, bagian selatan tepat berbatasan dengan laut flores.

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mawasangka dengan luas 269,55 km², disusul oleh kecamatan Lakudo 225 km² serta Mawasangka Tengah dengan luas 152,22 km² atau masing-masing sebesar 28,13%, 24,48% serta 16,88% terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya kecamatan Talaga Raya sebesar 71,31 km², kecamatan Mawasangka Timur 126,23 km², kecamatan Gu sebesar 104,00 km², sedangkan

²⁷ Naskah Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, *Buton Tengah dalam Angka Tahun 2019*, (Bau-bau: BPS Kabupaten Buton, 2019), h. 30

wilayah yang paling kecil adalah kecamatan Sangia Wambulu dengan luas wilayah 10 km² atau 1,04% dari total luas wilayah Kabupaten Buton tengah.

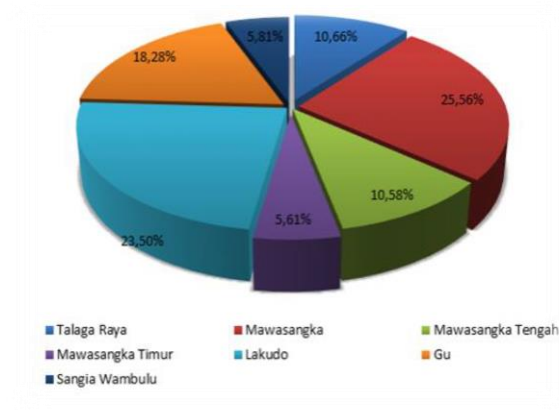
Presentase Luas Wilayah Kabupaten Buton Tengah Menurut Kecamatan:



4. Kondisi Demografis Kabupaten Buton Tengah

• Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS “Buton Tengah dalam Angka Tahun 2019”, jumlah penduduk kabupaten Buton Tengah sebesar 91.099 jiwa masing-masing tersebar di tujuh kecamatan dengan rincian antara lain; Talaga Raya sebanyak 9.708 jiwa, Mawasangka 23.286 jiwa, Mawasangka Tengah 9.636 jiwa, Mawasangka Timur 5.115 jiwa, Lakudo sebanyak 21.048 jiwa, Gu 16.654 jiwa, Sangia Wambulu 5.292 jiwa. Berikut presentase jumlah penduduk menurut kecamatan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Buton Tengah:



- **Keberagaman**

Keberagaman masyarakat di kabupaten Buton Tengah dapat ditandai oleh profil penduduk yang mempunyai latar belakang pekerjaan, bahasa dan agama yang heterogen. Meskipun hingga saat ini para antropolog dan sejarawan belum berani menetapkan kesepakatan berapa banyak sebenarnya etnis yang ada di Pulau Buton, termasuk kabupaten Buton Tengah. Tetapi, jika melihat sebaran kelompok masyarakat Buton Tengah, maka dapat digambarkan bahwa Buton Tengah didiami oleh penduduk dari berbagai etnis antara lain Buton-Gulamasta (Pancana), Mornene-Kabaena, Bajo, Muna, Wolio, suku suai, kaumbeda.

- **Mata Pencaharian**

Kondisi geografis yang diselimuti sebagian daratan dan sebagian lagi lautan telah mempengaruhi corak mata pencaharian masyarakat di Buton Tengah. Secara umum, mata pencaharian masyarakat bisa dibagi ke dalam beberapa segmen antara lain; pedagang, pengusaha sembako, petani atau mereka yang memanfaatkan penjualan dan distribusi hasil panen, nelayan, dan separuhnya adalah PNS. Dalam situasi tertentu, mata pencaharian masyarakat ikut berubah seiring dengan perputaran iklim dan cuaca. Banyak dari mereka yang memanfaatkan penjualan dan distribusi hasil panen, kadang harus beralih ke pekerjaan mendistribusikan hasil tangkap saat musim paceklik melanda, demikian sebaliknya. Bagi kelompok ini, profesi bukanlah sesuatu yang tetap dan bersifat kaku tetapi bisa saja berganti sewaktu-waktu.

- **Dinamika Sosial Budaya**

Sistem sosial budaya masyarakat Buton Tengah yang relatif terbuka telah membuatnya begitu dinamis mengikuti gerak dan perkembangan zaman. Penerimaan dan sikap terbuka masyarakat terhadap perbedaan serta nilai-nilai

budaya luar memberikan satu implikasi signifikan bagi berkembangnya ekosistem yang kondusif bagi berlangsungnya proses sharing dan transformasi ilmu pengetahuan, termasuk pula ide dan gagasan tentang kemajuan yang ditawarkan zaman. Di samping tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang sudah lama ada, secara bersamaan masyarakat Buton Tengah juga cenderung berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru yang di bawah oleh arus modernisasi dan globalisasi. Dinamika sosial budaya masyarakat di Buton Tengah juga cukup cepat mengadaptasi perkembangan dikarenakan banyak dari warganya adalah perantau di berbagai kota-kota besar di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini membuat proses akulturasi budaya asal dengan daerah atau kota-kota lainnya yang lebih dulu terkena arus kemajuan modernisasi, bisa terjadi.

B. Selayang Pandang Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Samahuddin-La Ntau)

1. Deskripsi Profil dan Riwayat Hidup

1.1. H. Samahuddin., S.E (Bupati Terpilih)

Berikut ini adalah tabel riwayat hidup Samahuddin:

| | |
|--------------------------|---|
| Nama | Samahuddin, S.E |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Wambuloli, 31 Desember 1964 |
| Riwayat Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Dasar Negeri Wambuloli (1971-1977) - Sekolah Menengah Pertama Mawasangka (1977-1981) - Sekolah Menengas Atas Bau-bau (1981-1984) - Sekolah Tinggi Ilmu |

| | |
|-----------------------|--|
| | Managemen Makassar (2003-2011) |
| Pengalaman Kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Direktur PT. Sumber Hasil Utama (2008-2016) - Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tenggara (2008-sekarang) - Bupati Buton Tengah terpilih periode 2017-2022 |
| Pengalaman Organisasi | Ketua DPC Partai Nasdem (2015-2020) |
| Moto Hidup | Kejujuran Adalah Kunci Sukses |

La Ramo merupakan sapaan akrab dari Samahuddin, Bupati Buton Tengah terpilih dalam pilkada 2017 silam. Pria kelahiran, Wambuloli, 31 Desember 1964 ini adalah seorang pebisnis (kontraktor) yang bergerak dalam jasa kontruksi bangunan dan properti sejak tahun 2006, tahun dimana ia mulai merintis sebuah perusahaan bernama PT. Sumber Utama yang berkantor di kota Bau-bau. Selain itu, Samahuddin juga terlibat aktif sebagai salah satu pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) wilayah Sulawesi Tenggara dari tahun 2008 hingga menjelang pemilihan. Prestasi dan sepak terjang dalam dunia jasa kontruksi yang ia torehkan selama 20 tahun terakhir, dengan berhasil memfasilitasi proses pembangunan infrastruktur seperti; jalan, dermaga, taman, perkantoran di beberapa titik kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara telah

memberikan satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Buton Tengah terkhusus desa Wambuloli tempat ia lahir dan dibesarkan. Disela-sela kesibukan dengan aktivitas bisnis yang ia geluti, tidak jarang keterlibatannya di ruang-ruang sosial juga dilakukan. Oleh karena itu, tidak heran bila pada tahun 2015 Samahudin dipercaya tetua dan masyarakat desa Wambuloli sebagai ketua Rumpun Kerukunan Keluarga Wambuloli (KKW) se Indonesia.

Kerukunan Keluarga Wambuloli merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang adat dan sebagai wadah silaturahmi antara perantau warga Wambuloli Se-Indonesia. Organisasi ini berkantor di Kabupaten Buon Tengah (Desa Wambuloli) dengan jumlah anggota kurang lebih 2000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aktivitas rumpun ini biasa dilakukan pasca 3 hari perayaan idul fitri, kegiatannya berupa pesta rakyat seperti mengadakan tarian adat, keseblasan bola, pencak silat (*manca*), atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan adat dan budaya rumpun kerukunan warga Wambuloli. Organinasasi ini selanjutnya menjadi salah satu mesin penggerak yang sangat aktif dalam upaya memenangkan pasangan Samahuddin-Lantau.

Di tahun yang sama Samahuddin juga dipercaya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (Nas-Dem)) Buton Tengah sampai dengan tahun 2020. Samahuddin dipercaya sebagai ketua DPC Partai Nas-Dem karena dianggap dirinya memiliki banyak relasi seperti relasi terhadap pemodal, terhadap petinggi-petinggi akademik maupun relasinya terhadap masyarakat. Modal itulah menurut partai Nas-Dem perlu dimiliki untuk membesarkan dan memperluas kiprah partai. Berikut pernyataan yang disampaikan Samahuddin mengenai alasan diberikannya mandat sebagai ketua DPC partai Nas-Dem Buton Tengah:

Jadi ada dua orang waktu itu kandidat ketua DPC Partai Nas-Dem yang akan di rekomendasikan wilayah ke DPP, dia itu pemuda asal Mawasangka juga, satu Kecamatan dengan saya. Hanya saja karena dari hasil survey partai dia kurang dikenal di masyarakat dan jarang pulang ke Daerah, makanya partai dia jatuhkan pilihannya sama saya. Mungkin karena pertimbangan sosialnya, seperti sering terlibat di kegiatan-kegiatan masyarakat atau karena saya juga punya anggaran yang cukup dari kegiatan bisnisku untuk besarkan ini partai.

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Samahuddin memiliki *bargaining* politik yang kuat sehingga dirinya dapat dipercaya untuk memimpin serta membesarkan partai besutaannya itu. Rutinitas dan aktivitas padat baik itu di ranah lokal maupun nasional yang dilakoninya tentu banyak menyita waktu dan perhatian. Akan tetapi di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri bertemu dan bertatap muka dengan warga masyarakat dan tak luput selalu berpesan agar menanamkan prinsip dalam diri untuk bekerja keras dan selalu bersikap jujur sebab inilah kunci kesuksesan sesungguhnya. Kita tidak mesti berputus asa terlahir dengan keadaan miskin, karena pada akhirnya kita akan menjadi sukses karena sikap jujur yang kita bawa.

Jika dirunut, sebenarnya yang semakin memperkuat Samahuddin sehingga terjun melibatkan dirinya menjajaki dunia politik karena adanya dorongan dari beberapa tokoh masyarakat ketika ia datang bersilaturahmi. Dalam kesempatan itu, masyarakat memberikan dukungan moril kepadanya agar segera mencalonkan diri sebagai bupati Buton Tengah saat tiba pembukaan hari pendaftaran KPUD Buton Tengah. Komunikasi ini berlangsung menjelang dibentuknya tim pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Buton Tengah tahun 2014. Faktor lain ketertarikan Samahuddin ingin melibatkan diri dalam dunia politik yakni atas niat ingin membangun Daerah dengan kewenangan dan kekuasaan yang diamanahkan rakyat serta dilindungi Undang-Undang. Nawaitu ini lahir dengan harapan dapat

menciptakan pemerataan pembangunan dan distribusi keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.

1.2. Purn. La Ntau (Wakil Bupati Terpilih)

Tabel riwayat hidup La Ntau

| | |
|--------------------------|--|
| Nama | La Ntau |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Buton, 19 Februari 1965 |
| Alamat | Kel. Watulea, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah |
| Riwayat Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Dasar Negeri 2 Lombe (1973-1979) - Sekolah Menengah Pertama Negeri Lombe (1979-1982) - Sekolah Menengah Atas Jayapura (1989) - Secapa TNI AD (2003) - Sussarcabif TNI AD (2004) - Tar SJM TNI AD (2004) - Suspakop TNI AD (2007) |
| Pengalaman Kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Pratu TNI AD (1989) - Serda TNI AD (1994) - Sertu TNI AD (1998) - Letda TNI AD (2003) - Lettu TNI AD (2007) - Kapten TNI AD (2011) |

| | |
|-------------|---|
| Penghargaan | <ul style="list-style-type: none"> - Operasi GOM 9 TNI AD (1989) - Dwijasista TNI AD (1990) - Bintang Kartika Eka Paksi (2013) |
| Motto Hidup | Maju Tak Gentar Memperjuang Kebenaran |

Purnawirawan TNI AD La Ntau adalah orang yang mendampingi Samahuddin sebagai Wakil Bupati Buton Tengah. Karena keinginan dan tekad yang kuat untuk kembali lebih dekat mengabdikan diri membangun daerah kelahiran, ia rela melepaskan jabatannya sebagai TNI AD dan berusaha mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati. Berbeda dengan dunia ketentaraan yang sudah ia geluti puluhan tahun, terlibat dalam politik praktis yang mengharuskan kerja-kerja pengorganisasian, kampanye, komunikasi lintas elit, mempengaruhi massa, branding personal dan lain-lain baginya merupakan pengalaman pertama. Tetapi ketersohoran beliau dimata masyarakat menjadi cacatan tersendiri yang ia miliki sebagai modal awal.

Hal di atas bisa terjadi karena memang La Ntau selain sibuk meraih prestasi dalam korpsnya, tidak jarang juga terlibat dalam kegiatan dan upacara-upacara adat di Pulau Buton. Atas dasar itu pulalah sehingga pada tahun 2016 La Ntau dipercaya sebagai salah satu Dewan Adat Kerukunan Rumpun Bombonawulu, rumpun ini merupakan salah satu rumpun adat dari kesultanan Buton yang mewakili wilayah adat kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas, kegiatan dan perayaan hari-hari besar adat merupakan sebuah sesuatu yang masih dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Buton Tengah, termasuk masyarakat kecamatan Gu.

Dalam sebuah kesempatan, bapak La Ntau menyampaikan satu prinsip yang selalu ia pegang bahwa dengan bermodalkan disiplin, bekerja keras serta memperjuangkan nilai kebenaran yang terintegrasi dalam entitas sosial, semua cita-cita akan terjawab. Dari hal-hal kecil itulah kemudian tercipta kepercayaan masyarakat luas, elektabilitas meningkat, citra atau *image* baik dapat muncul, persepsi publik pun akan menggambar sesuatu yang baik tentang kita. Selanjutnya beberapa hal kecil di atas bisa menjadi sebuah rujukan politik yang dapat diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi.

C. Bentuk Modalitas Politik Yang Dimiliki Pasangan Samahuddin-La Ntau

1. Modal Ekonomi

Secara finansial, kekayaan pasangan calon Samahuddin-La Ntau berdasarkan hasil verifikasi KPU Buton Tengah sebesar Rp. 1,2 Miliar. Angka ini merupakan gabungan dari dana pribadi pasangan calon ditambah dengan donasi dari relawan atau masyarakat. Jika merujuk dari pengertiannya, modal ekonomi mencakup berbagai hal mengenai sarana produksi dan sarana finansial. Karena itu, selain berupa uang, modal ekonomi juga berkaitan dengan alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), pendapatan dan benda-benda. Dalam konteks ini, nominal kekayaan pasangan Samahuddin-La Ntau yang telah disebutkan masihlah merupakan modal uang yang terlihat saja, belum diakumulasikan dengan kekayaan dan aset lainnya. Mengutip pernyataan Samahuddin dalam sebuah pertemuan:

Istilahnya begini andiku (sapaan adik); politik tanpa uang sama dengan lumpuh, sementara uang tanpa politik sama dengan buta. Dalam politik itu tetap pake uang atau modal. Jadi selama momentum ini, ada dua jenis “sumber anggaran yang ada; Pertama, dari anggaran pribadi dari relawan (donatur). Mereka ini dari pengusaha miliarder sampai masyarakat kecil yang datang menyumbang. Besar kecilnya tidak menentu bahkan kadang ada yang hanya kasih aqua dos, ada juga yang kasih bensin untuk operasional mobil relawan, ada juga yang menyumbang untuk pembeli

kopi/gula. Pokoknya total LPPDK yang kita laporkan di KPUD Buton Tengah sekitar Rp. 1.290.000.000,- itupun yang kita laporkan masih dalam bentuk sumbangan uang, belum barang yang kita terima masyarakat.”

Modal ekonomi memang sangatlah urgen untuk menstimulus berjalannya aktivitas atau sebuah program yang sudah direncanakan. Apalagi, kaitannya dengan kerja-kerja kampanye politik dalam momentum pemilu. Dalam konteks ini, seorang kandidat mesti terlebih dahulu mempersiapkan modal (anggaran) untuk bisa dipakai dalam mengeksekusi program kampanye strategis maupun taktis yang mendesak untuk segera dilakukan. Anggaran yang dipersiapkan paling tidak harus menjangkau dan cukup untuk digunakan selama kurang lebih 8 bulan sesuai tahapan pemilu mulai dari awal hingga pleno penetapan kandidat terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ditambah lagi dengan biaya operasional kerja tim kampanye dari skala kabupaten sampai desa atau kelurahan. Segala kebutuhan biaya tersebut harus diakomodir dan difasilitasi oleh seorang kandidat rutin selama masa tahapan pemilu berlangsung. Oleh karena itu, tak heran bila *cost politic* yang besar dan mahal harus bisa ditanggung oleh siapapun yang ingin terjun dalam kontestasi pemilu. Berikut ini pengakuan H. Gani, ketua tim kemenangan kabupaten SAMATAU:

“Semua sumber dana yang kami dapat itu diporsikan berdasarkan kebutuhan tim dan masing-masing teritori. Misalkan pembuatan posko-posko kemenangan kurang lebih 150 titik di 7 kecamatan dan 77 Desa/Kelurahan, pembiayaan survey elektabilitas, pengadaan alat peraga kampanye, biaya operasional tim, biaya beriklan, biaya advokasi dan biaya lain yang tidak terduga. Biaya lain-lain yang kita taksir justru paling banyak pengeluarannya. Jadi anggaran awal yang 270.300.000,- sama sumbangan itu semua kita pake habis untuk kebutuhan tim.”

2. Modal Sosio-Kultural

Modal sosial merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk memperoleh akses terhadap sumber daya baru lainnya. Sumber daya yang dipakai untuk investasi inilah yang disebut dengan modal. Modal sosial disini

tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang. Misalnya pada hubungan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok lalu menjadi norma bersama yang dipatuhi. Modal sosial dapat ditemukan juga diaplikasikan dalam berbagai ranah dan kepentingan disertai dukungan sumber daya fisik dan pengetahuan akan budaya yang dimiliki, begitu pula sebaliknya.

Dari sini diketahui bahwa antara modal sosial dan kultural saling berkelindan mendukung dan menguatkan satu sama lain. Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan terhadap nilai – nilai (*values*) tentang segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya untuk mengaktualisasikannya. Modal kultural tidak dengan sendirinya mewujudkan menjadi realitas yang bermanfaat bagi orang yang meyakini atau masyarakat pada umumnya tetapi ia mirip dengan kemanfaatan modal sosial, dalam pengertian bahwa kemampuan dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk memelihara, melestarikan, memperbaharui, dan memanfaatkannya.²⁸

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau pada bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah. Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat dalam hal membangun

²⁸Sumarno, dkk, “*Orientasi Modal Sosial dan Modal Kultural di Fakultas Ilmu Pendidikan U.N.Y*”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 2 (September, 2013), h. 70

relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kedudukan dan meningkatkan strata sosial seseorang.²⁹

Dalam konteks ini, terlihat bahwa modal sosial kultural yang dimiliki oleh pasangan Samahaddin-La Ntau sangat kental dan kuat mengakar pada keyakinan pemilih, terutama bagi sebagian besar yang menganggap figur Samahuddin merupakan sosok yang santun, sederhana, akrab, suka memberikan santunan dana kepada yatim piatu. Demikian pula La Ntau, dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap masyarakat menengah ke bawah dan tidak memberikan batasan tegas antara dirinya sebagai pemimpin dengan masyarakat bawah. Berikut hasil wawancara dengan para pemilih:

Kita sebagai masyarakat nelayan membutuhkan seorang pemimpin yang peduli dengan kondisi dan keberadaan kami yang tidak hanya diingat saat pemilihan saja, tetapi harusnya setiap saat. Kita ini sebenarnya selalu berharap agar ke depan dengan terpilihnya bapak Samahuddin dan La Ntau, kondisi kami masyarakat nelayan bisa lebih baik. Saya yakin, janji yang sudah dikatakan oleh bapak Samahuddin pasti akan ia penuhi, saya percaya beliau sebagai orang yang menepati jujur menepati janji dan peduli sama orang kecil seperti kami,” pernyataan Lakarambau, nelayan kampung kelurahan watolo.

Pemimpin yang baik itu yang memiliki akhlak dan moral. Seorang yang taat agama dan baik ibadahnya yang semoga bisa menentukan bagus jalannya pemerintah ke depan. Sejauh ini, saya melihat La Ntau orangnya taat beribadah, suka menyantuni dan memperhatikan orang-orang kecil di sekelilingnya, ia juga peduli dan sering terlibat dalam aktivitas keagamaan yang diselenggarakan di kampung ini. Padahal jika diperhatikan banyak orang segan terhadap beliau karena posisinya sebagai tentara tapi ia sendiri seperti tidak mau punya batasan dengan orang-orang dan sering membaur dengan kita dengan biasa saja. Beliau itu orang yang pantas untuk menjadi pemimpin, meskipun berposisi sebagai wakil Bupati tapi ia cukup bisa dipercaya untuk membawa daerah Buton Tengah ke arah yang lebih baik,” pernyataan La Uzuni seorang tokoh agama di kecamatan Sangia Wambulu, ketika diwawancara.

²⁹Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, h.37

3. Modal Simbolik

Sebagaimana kecenderungan yang ditemukan selama proses wawancara berlangsung juga ditunjukkan dari beberapa kutipan beberapa responden di atas, secara simbolik menegaskan bahwa status sosial, prestise, ketersohoran, kehormatan memiliki andil penting dalam pembentukan opini dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Pembawaan, prestise, ketersohoran serta kecakapan *personality* figur Samahuddin-La Ntau semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menetapkan pilihannya.

Nurjani, tokoh masyarakat mawasangka mengatakan, “bapak Samahuddin itu adalah salah satu putra daerah terbaik yang dimiliki oleh mawasangka, jauh sebelum datangnya pemilihan ini, telah banyak prestasi dan kinerja yang ia sumbangkan kepada daerah Buton Tengah. Sebagai seorang kontraktor, banyak sudah sumbangsih pembangunan yang coba ia usahakan untuk daerah. Selain itu, kita memilih pasangan Samahuddin-La Ntau, karena kita percaya bahwa hanya orang-orang yang punya niatan baik dan usaha keras, yang punya ikatan emosional dan kekerabatan yang kuat dengan kita yang akan peduli untuk membangun daerah kita itu sendiri.”

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah yang mahal, mobil dengan supirnya, namun bisa juga petunjuk – petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya.³⁰

³⁰ Haryatmoko, “Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu : Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa”, Jurnal/Majalah BASIS, No. 11-12 (November-Desember 2003), 43-45

Dalam kesempatan lain seorang responden berinisial “R” juga mengungkapkan tanggapannya terhadap pasangan Samahuddin-La Ntau sebagai berikut:

“Pasangan Samahuddin-La Ntau sama-sama orang yang punya prestasi. Samahuddin kalau mau dilihat latar belakang keluarganya hanyalah orang biasa-biasa saja, ia dibesarkan di pelosok desa yang jauh dan agak sulit mengakses sumber-sumber dan sarana untuk meningkatkan derajat dan status sosial diri dan keluarganya tapi karena tekadnya yang kuat untuk menjadi orang sukses, ia bisa melanjutkan pendidikan di kota Bau-bau dan pada akhirnya menjadi pengusaha dengan berbagai macam prestasi sudah ia persembahkan. Sedangkan, wakilnya La Ntau, prestasinya sebagai anggota TNI, jenjang karir dan berbagai penghargaan atas prestasi yang sudah beliau terima, membuktikan kecocokan keduanya untuk bekerjasama. Buton Tengah butuh orang-orang yang punya tekad dan prestasi seperti mereka supaya daerah ini menjadi lebih baik lagi.

Modal simbolik erat kaitanya dengan akumulasi pengetahuan dan budaya penghormatan yang tinggi sehingga modal ini cukup leluasa juga untuk berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan deajat pengetahuan yang sudah maju serta yang menjunjung tinggi sebuah kehormatan baik didasari bentukan simpul-simpul budaya maupun sebuah penghormatan akan simbol-simbol prsetise yang sudah ditorehkan seseorang atau lembaga.

D. Upaya Samahuddin-Lantau dalam Memanfaatkan Modalitas Politik

Yang Dimiliki

1. Lobbi Partai Politik

Dalam pemilu, partai politik maupun pasangan calon, sama-sama digolongkan sebagai peserta pemilu. Partai politik maupun pasangan calon ini yang nantinya akan mengisi dan memeriahkan gelanggang pertarungan atau kontestasi pemilu. Dalam praktek, pasangan calon dan partai politik akan saling membangun hubungan simbiosis-mutualisme. Secara normatif, partai politik akan

menentukan dan menyiapkan kader terbaiknya untuk dicalonkan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam nuansa politik yang sarat dengan praktek transaksional, seringkali partai politik mengusung pasangan calon yang bukan merupakan kader partai sehingga memungkinkan bagi siapa saja yang hendak mencalonkan diri untuk diusung.

Dalam konteks ini, terjadilah yang namanya proses lobbying antara pasangan calon dengan partai politik. Pasangan calon hadir dengan membawa kepentingannya untuk memperoleh dukungan dari partai politik, sementara partai politik berkepentingan untuk mempertahankan dan menancapkan kekuasaannya dalam tubuh pemerintahan dengan cara memilih pasangan calon yang tepat, punya elektabilitas tinggi dan terjamin bisa memenangkan kontestasi pemilu. Akan tetapi perbedaan preferensi dari masing-masing partai politik dalam menentukan sikap dan pilihannya tak bisa dihindari sehingga membuat polarisasi kekuatan terbelah ke dalam beberapa poros. Oleh karena itu, tidak heran bila muncul partai politik atau gabungan partai politik mendukung pasangan tertentu dan tidak mendukung yang lain, begitu seterusnya.

Pasangan calon Samahuddin-La Ntau dalam hal ini terbilang berhasil karena telah mampu membangun komunikasi dengan beberapa partai politik besar seperti Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI-P), Partai Nasional Demokrasi (Nas-Dem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga mereka dapat didukung dan diusung oleh partai-partai tersebut. Padahal, jika diperhatikan kedua pasangan ini bukanlah kader ideologis atau tidak berasal dari partai tapi karena ketersohoran dan elektabilitas mereka yang sudah lebih duluan mencuat di hadapan masyarakat para (konstituen) membuat gabungan partai politik di atas tertarik memberikan dukungan. Berikut pengakuan bapak Kadir Teme, S.Pdi,

selaku Pimpinan Cabang Partai PDI-P, salah satu partai pengusung pasangan Samahuddin-La Ntau;

“Penetapan pilihan partai kami PDI-P kepada pasangan Samahuddin-La Ntau melalui proses yang panjang. Jauh sebelum tahapan pemilihan dimulai, secara internal partai kami memang telah berupaya mengidentifikasi siapa kira-kira orang yang tepat untuk diusung menjadi kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pilkada Buton Tengah tahun 2017. Awalnya tentu kami melihat ke dalam internal partai, memilah-milah kader, beberapa kali melakukan rapat internal dan pada akhirnya semua bersepakat agar mengusung pasangan Samahuddin-La Ntau yang kami anggap cocok mesti bukan berasal dari kader partai tetapi secara garis ideologis paling tidak Samahuddin-La Ntau sebagai representasi wong cilik berdasarkan latar belakang dan kecenderungan opini publik yang berkembang ditambah lagi semangat dan tekad keduanya untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang didapati di saat keduanya datang hendak meminta restu diusung maka kami merasa perlu untuk mengusung pasangan Samahuddin-La Ntau. Kami ingin menyampaikan satu pesan bahwa orang dengan latar belakang kelas menengah bawah pada dasarnya harus didukung untuk menjadi pemimpin di negeri ini.”

Selanjutnya tanggapan dari Pimpinan Cabang partai PKB Buton Tengah, Mutalib mengungkapkan bahwa;

“Sebenarnya yang datang mengetuk pintu dan meminta restu dari partai kami, bukan hanya pasangan calon Samahuddin-La Ntau, melainkan rivalnya Mansur-Saleh juga pernah. Kami menerima keduanya sebagai satu gambaran sikap inklusifitas kami yang membuka peluang kerjasama selebar-lebarnya dengan semua pihak, siapapun yang ingin menjalin hubungan kemitraan yang baik, kami terima dengan baik pula. Meskipun pada akhirnya kami putuskan untuk mendukung dan mengusung pasangan Samahuddin-La Ntau. Catatan evaluasi dan pertimbangan mendasar kami selain kepentingan mendesak partai PKB, kami juga amat memperhatikan amanat perjuangan partai kami yang ketat menjunjung dan mengampanyekan agenda-agenda keumatan dan hal ini lebih kental terlihat dari ide-ide dan gagasan besar pasangan Samahuddin-La Ntau.

Sebagai bagian dari peserta dalam pemilu, manuver partai politik menjadi sesuatu yang sangat penting dan besar peranannya dalam menentukan kemenangan pasangan calon atau seorang kandidat. Hal itu dikarenakan partai merupakan sebuah mesin politik yang dapat bekerja dengan solid, lebih

terstruktur, sistematis dan masif, dapat memanfaatkan sarana kelengkapan yang dimiliki, akses serta relasi kuasa yang telah mapan. Sehingga untuk bergerak, partai politik cenderung bisa lebih leluasa menancapkan pengaruh-pengaruh kekuasaan dan mengartikulasikan kepentingannya. Partai politik juga mempunyai jejaring yang relatif mudah untuk dinegosiasikan dan sudah terjalin kuat dengan berbagai struktur pemerintahan yang ada. Dari sisi basis politik, partai juga telah memiliki simpul-simpul konstituen riil yang sebelumnya telah dibentuk, diorganisir dan diupayakan sehingga bisa memperoleh suara, duduk menempati kursi di DPRD. Apalagi, katakanlah partai politik yang dimaksud adalah partai dengan perolehan kursi terbanyak. Itu artinya konstituen yang mereka miliki juga berjumlah banyak, kepemilikan basis massa ini hanya tinggal diidentifikasi, dimanfaatkan dan dimasifkan kembali.

Jika dikalkulasi, gabungan partai pendukung pasangan Samahudin-La Ntau di atas merupakan gabungan partai dengan perolehan kursi paling dominan di DPRD Buton Tengah. Partai PDI-P menempati 2 kursi, Nas-Dem 2 kursi, PKB 2 kursi Keberhasilan lobbying partai politik dengan perolehan dukungan dari 5 partai yang berdasarkan hitungan perolehan komposisi kursi di DPRD, beberapa partai yang turut membantu pasangan Samahuddin-La Ntau tersebut adalah partai-partai yang mendominasi perolehan kursi di DPRD Buton Tengah. Dengan dukungan dari gabungan (koalisi) partai politik ini, maka kekuatan Samahuddin-La Ntau untuk bisa meraih kekuasaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah sudah diperoleh dan terlegitimasi dengan kokoh.

Produk utama dari sebuah institusi politik adalah *platform* partai yang berisikan konsep, identitas ideologi dan program kerja institusi politik, karakteristik atau ciri seorang pemimpin atau juga seorang kandidat memberikan citra, simbol dan kredibilitas sebuah produk politik. Kandidat atau partai harus

cermat dalam memilih konsep produk yang akan dipasarkan. Konsep produk bukan sekedar sebuah slogan; konsep produk menyangkut semua kebutuhan dalam implementasi kampanye politik yang mencakup koalisi yang dibentuk, pernyataan yang dibuat, penampilan di depan publik, dan berbagai hal lain.

2. Membentuk dan Merawat Kekompakan Tim Pemenangan SAMATAU

Kekuatan dan kekompakan tim merupakan unsur penting bagi keberhasilan sebuah kerja-kerja bersama. Demikian halnya dalam kerja-kerja kampanye politik, karena kompleksitas dan keluasan domainnya maka mengharuskan adanya kerja tim yang kuat dan kompak. Hal ini dibutuhkan agar segala program strategis maupun taktis yang telah dicanangkan bisa dieksekusi dengan akurat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Semangat dan kegigihan sebuah tim tentu tak lepas pula dari proses internalisasi nilai-nilai dan pemahaman yang mereka terima dan peroleh dari seseorang yang mereka sedang perjuangkan. Kekompakan dan kerja keras sebuah tim kampanye juga mencerminkan besarnya daya tarik dan kemampuan pemimpin mengelola sumber daya yang dimiliki. Berikut ini ungkapan dari bapak Lantau (Wakil Bupati terpilih) sekaligus mengonfirmasi kecenderungan di atas antara lain;

Upaya kita dalam memperkuat tim kampanye mulai dari tingkatan kabupaten sampai kelurahan/desa beserta pejabat terasnya seperti kepala dusun, kepala Rt/Rw telah kita tentukan dan seleksi dengan ketat. Kita telah membentuk sebuah tim yang solid dan kompak, terbukti dengan keberhasilan mereka menambah jaring-jaring pendukung hingga ke bawah. Banyak dari mereka melaporkan, selain keluarga inti masing-masing individu tim, mereka juga telah berhasil menambah jumlah pendukung yang bisa mereka jaga hingga hari H pemilihan. Setelah kita evaluasi, margin eror dari presentasi kerja-kerja mereka sangatlah minim, makanya tidak heran, dari 7 kecamatan yang ada, 5 di antaranya kami jauh lebih unggul. Tapi keberhasilan itu sebenarnya tak juga lepas dari upaya rutin kita memberikan mereka pemahaman sehingga tercipta kesadaran dalam benak mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia karena mereka merasa diberdayakan dengan hadirnya program dan visi-

misi yang kita tetapkan. Hal itulah yang memotivasi tim dalam bekerja, ada sebetulnya kepercayaan yang mereka curahkan kepada kami.

Tim pemenangan SAMATAU dibentuk sejak awal tahun 2016, dipelopori oleh beberapa tokoh pemuda asal Buton Tengah dan kota Bau-bau. Samahuddin diusung pemuda karena dianggap sebagai representatif seluruh kelompok masyarakat. Melalui diskusi di warung kopi pantai Kamali, akronim SAMATAU terbentuk dan sekaligus melahirkan keputusan sikap Samahuddin dalam menyanggupi kesediaannya untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Buton Tengah periode 2017-2022, namun kesanggupan pernyataan tersebut dengan catatan La Ntau harus mendampinginya sebagai perwakilan kecamatan lain di luar dari kecamatan Mawasangka Raya (Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur).

Akronim SAMATAU yang juga merupakan singkatan dari nama pasangan Samahuddin-La Ntau selanjutnya dipilih menjadi nama tim pemenangan. Mesin penggerak tim ini terdiri dari 3 struktur perangkat kerja, di antaranya gabungan partai politik pengusung (koalisi), pasangan calon, kelompok relawan pemuda serta beberapa tokoh masyarakat kecamatan yang ada di kabupaten Buton Tengah. Partai pengusung (koalisi) terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasinol Demokrasi (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara tokoh masyarakat yang dimaksud diwakili oleh beberapa koordinator-koordinator tim pemenangan yang dibentuk dari struktur di tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

Tim SAMATAU dibentuk sebagai langkah strategis dalam upaya memenangkan Samahuddin-La Ntau di pemilihan umum kepala Daerah Buton Tengah tahun 2017. Selain itu juga sebagai prosedur dan legitimasi kerja-kerja tim

di lapangan untuk membangun koordinasi antara struktur tim level Kabupaten sampai struktur tim level Desa/kelurahan. Sebagai langkah legitimasi, tim SAMATAU melakukan rapat perdana yang dihadiri partai koalisi, pasangan calon dan relawan SAMATAU, tujuan dari rapat perdana tersebut yaitu untuk melahirkan rekomendasi sebagai acuan kerja tim dalam menjalankan roda kerja-kerja tim pemenangan.

Pertemuan rapat perdana yang diselenggarakan antara pasangan calon, partai pengusung, dan relawan membuahkan 8 rekomendasi hasil kesepakatan. Hal tersebut dilakukan, sebagai rujukan pembagian fungsi kerja antara pasangan calon, partai koalisi dan relawan SAMATAU yakni di antaranya :

- a. Membentuk dan mengukuhkan struktur tim Pemenangan (relawan) SAMATAU, tanpa melibatkan mesin partai koalisi.
- b. Kewenangan paslon dan partai koalisi hanya membentuk tim di tingkat kabupaten dan kecamatan, terkecuali ada satu dan lain hal yang mengharuskan melibatkan partai koalisi dan paslon.
- c. Membentuk dan merumuskan visi-misi program kerja pasangan SAMATAU.
- d. Partai koalisi disamping sebagai tim kampanye Kabupaten, sewaktu-waktu juga membantu tim pemenangan kecamatan di tingkatan desa/kelurahan.
- e. Tim kabupaten dan partai koalisi hanya bersifat koordinasi tidak bersifat perintah.
- f. Kerja-kerja antara tim pemenangan dan partai koalisi mempunyai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing dalam pelaporannya.

- g. Mendesain dan membentuk citra politik pasangan calon SAMATAU di masyarakat Buton Tengah.
- h. Hal-hal yang belum diatur oleh Paslon dan partai koalisi, akan ditinjau kembali dan akan diatur dikemudian hari jika terdapat kekeliruan atau kondisi yang mengharuskan untuk diatur.

Hasil rekomendasi tersebut mengharuskan satu koordinator yang memimpin tim tingkat Kabupaten dan masing-masing kecamatan di pimpin oleh satu orang koordinator. Begitupun seterusnya sampai pada tingkatan Desa/kelurahan yang mengharuskan satu Desa/Kelurahan dipimpin oleh satu orang koordinator. Untuk itu, berdasarkan pembagian administrasi, geografis Buton Tengah terdiri dari 7 Kecamatan dan 76 Desa/Kelurahan, maka pembentukan koordinator tim pemenangan ditargetkan dibentuk pada 7 titik kecamatan dan 76 titik Desa/kelurahan sebagai tim pemenangan (relawan) SAMATAU.

Struktur tim pemenangan SAMATAU terdiri dari beberapa perangkat kerja yakni Ketua Tim Kabupaten, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan 7 koordinator kecamatan serta 76 koordinator Desa/Kelurahan. Sementara para ketua-ketua partai koalisi yang bertugas di samping sebagai tim kampanye paslon SAMATAU, ketua-ketua partai juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinir dan mendistribusikan visi-misi kandidat sampai pada lapisan bawah pemilih. Partai koalisi yang berperan sebagai penopang kerja-kerja relawan dan pasangan SAMATAU dalam memenangkan persaingan dalam pilkada Buton Tengah, di samping itu pula berfungsi membentuk citra institusi politik untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat pemilih saat memberikan hak dalam menentukan pilihan politiknya pada kandidat yang diusung.

3. Membangun Komunikasi Lintas Elit

Komunikasi lintas elit di sini merujuk kepada upaya konsolidasi kekuatan yang senantiasa dilakukan dalam mencari, mempertahankan, memperbanyak dukungan pada tingkatan elit di antaranya pejabat atau pemangku kebijakan di daerah Buton Tengah seperti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Badan, Camat, Lurah hingga pejabat teras di desa-desa. Selain sebagai langkah paling menguntungkan, komunikasi secara vertikal ditingkatan elit juga dilakukan oleh pasangan calon Samahuddin-La Ntau atas pertimbangan terhadap efektifitas dan efisiensi dari kerja-kerja politik dan juga upaya untuk membentuk pengertian bersama tentang bagaimana seharusnya setiap pihak bersikap.

Kemampuan menjalankan dan memaksimalkan pengaruh terhadap agen-agen utama struktur sosial dalam kerangka budaya politik yang masih patriarkis seperti di daerah Buton Tengah menjadi salah satu langkah yang tepat yang sangat memungkinkan untuk menancapkan kekuasaan dengan kuat dan stabil. Dalam konteks ini, pengaruh struktur dan agen-agen utama dalam struktur sosial masyarakat sebagaimana sudah disebutkan di atas begitu berarti digerakan untuk mengakumulasi legitimasi kekuasaan. Struktur dan agen-agen penggerak itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri yang bisa memenangkan.

“Keunggulan kami terletak pada besarnya dukungan yang datang dari berbagai kalangan elit di Buton Tengah, mulai dari pejabat-pejabat dinas maupun camat hingga desa-desa, semua bahu membahu memberikan dukungan baik berupa moril maupun tenaga dan materi untuk memenangkan pasangan Samahuddin-La Ntau. Ungkapan tim pemenang kabupaten SAMATAU, H. Gani dalam sebuah wawancara.

Capaian terbesar Samahuddin-La Ntau dapat dikatakan terletak pada manuver yang satu ini. Tak tanggung-tanggung, meskipun notabene lawannya adalah seorang petahana dalam hal ini Mansur Amila Pjs. Bupati Buton Tengah yang bersanding dengan Saleh Ganiru tetapi secara struktural dan manuver

komunikasi dengan kalangan elit, mereka berhasil mendominasi dukungan mulai dari jajaran perangkat OPD Buton Tengah, beberapa Camat dan Lurah. Berikut pemaparan bapak berinisial “H” salah satu pensiunan dinas pendidikan Buton Tengah saat diwawancara;

Sebagai bagian dari aparat sipil negara, tentu secara konstitusi kami dibatasi oleh undang-undang sehingga tidak bisa untuk ikut secara terang-terangan mengampanyekan pilihan politik kami, apalagi untuk mengorganisir. Kepada siapapun, saya dan teman-teman yang lain tetap harus bersikap netral, entah apakah ia selaku atasan fungsional kami yang kebetulan mencalon lagi atau pendatang baru, kami tetap dilarang untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja praktis kampanye. Tetapi berdasarkan hati nurani dan kalau harus menyalurkan pilihan, saya dan beberapa pimpinan OPD Buton Tengah memang lebih memilih pasangan Samahuddin-Lantau. Kita tertarik bukan hanya karena pembawaan yang bersahabat dari kedua pasangan Samahuddin-Lantau, tetapi visi-misi dan rekam jejak prestasi keduanya cukup menjanjikan untuk memimpin daerah Buton Tengah.

Perbedaan kemampuan diantara manusia memungkinkan ada kelompok yang mendominasi dan kelompok yang didominasi. Kelompok yang mendominasi inilah yang kemudian dikonsepsikan sebagai elit. Elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan. Elit adalah kelompok orang yang menguasai kekuasaan dan kekuasaan merupakan tempat bagi muncul dan berkembangnya elit. Posisi mendominasi atau didominasi hanya dapat terjadi ketika mereka memiliki kesamaan pemahaman terhadap sesuatu yang dianggap sumber daya atau modal yang oleh mereka sendiri dibutuhkan dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara bersama. Begitu pentingnya sumber daya dimaksud sehingga menimbulkan upaya untuk selalu menjaga dan mampu mengikat kehidupan di antara sesama. Sumber daya inilah yang kemudian dikonsepsikan oleh Boerdiue sebagai modal.³¹ Modal itu bisa berupa kekuasaan material, kekuasaan sosial dan juga kekuasaan simbolik. Ketiga modal kekuasaan

³¹ George Ritzer dan Douglas Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 523

tersebut hadir bersamaan dan saling terkait/mempengaruhi. Ketiga, perubahan sosial. Perubahan mencakup suatu sistem sosial, dalam bentuk organisasi sosial yang ada di masyarakat, dapat terjadi lambat, sedang atau cepat tergantung situasi (fisik, buatan atau sosial) yang mempengaruhinya.

Pada konteks yang lain, perubahan sosial juga berdampak pada aktualisasi dalam bentuk kelembagaan. Guna menguasai struktur baru yang dimobilisir oleh perubahan sosial, entitas tradisonal atau aktor ditingkat lokal cenderung untuk melihat ruang peluang guna mengkonstruksi legitimasi. Dengan hadirnya struktur sosial baru maka individu atau kelompok yang mendominasi menjawabnya dengan cara masuk dalam struktur tersebut guna mengakumulasi modal sehingga tetap menjaga modal kekuasaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan, mengadaptasi atau mengubah modal kekuasaannya itu. Perubahan itu bisa dalam bentuk revitalisasi, adaptasi maupun reposisi.

4. Objektivikasi Visi-Misi dan Proker Samahuddin-La Ntau Sebagai Langkah Mempengaruhi Pemilih Kategori Rasional

Artikulasi dari pemilih rasional merupakan sebuah transisi tim kemenangan dalam mendekati ciri dan sifat dari pemilih tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa pemilih rasional memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda diantara beberapa jenis kelompok pemilih yang ada di Buton Tengah. Latar belakang dari pemilih ini yakni memiliki daya kritis dan tingkat pendidikan yang tinggi dibanding kelompok pemilih yang lain.

Ciri dan karakteristik dari pemilih rasional yaitu dalam membuat keputusan memilih, sangat berhati-hati saat menentukan pilihan politiknya. Secara umum pemilih ini memilih berdasarkan pada analisis kritis dari tawaran program politik, visi-misi, platform, atau tentang masa depan Daerah yang ditawarkan

kompetitor. Pemilih rasional melihat tawaran *competitor* tidak secara parsial tetapi secara komprehensif, mulai dari visi-misi program politik, personal *branding* kandidat, atau partai pendukung kompetitor. Penilaian ini mencakup bagaimana pembangunan *sustainable* yang solutif, seberapa tepat program politik yang ditawarkan kandidat pada pasar pemilih dengan kesesuaian potensi Daerah yang dimiliki, serta bagaimana cara memanfaatkan potensi Daerah yang dimiliki. Dengan demikian pemilih rasional dapat memilah, memperhatikan dan memutuskan apa yang sarat dengan kepentingan kelompok pemilih dan Daerah dimasa mendatang. Keuntungan dari kelompok pemilih rasional saat mendukung kompetitor adalah metode memobilisasi dan cara mereka dalam mempengaruhi kelompok pemilih yang lain untuk ikut serta dalam mendukung apa yang menjadi keputusan yang telah mereka buat.

Bergabungnya kategori pemilih rasional dalam barisan pendukung pasangan Samahuddin-La Ntau seperti di atas semakin melengkapi perolehan suara dari berbagai segmentasi pemilih yang ada. Segmentasi pemilih rasional ini melingkupi akademisi, pegawai negeri sipil, para peneliti dan pegiat sosial, para pelajar (mahasiswa) beserta tokoh-tokoh masyarakat dengan taraf pendidikan yang telah mengetahui atau melek politik. Pada prinsipnya, mempengaruhi kelompok ini cenderung lebih mudah dilakukan ketimbang yang lain, asal dengan cacatan ide atau gagasan pembangunan yang termuat dalam visi-misi kandidat harus sesuai dengan preferensi yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, kejelasan dan kesesuaian visi-misi yang ditawarkan seorang pasangan kandidat menjadi parameter utama yang membuat mereka dapat dipilih. Memperhatikan tuntutan dan desakan berdasarkan pertimbangan rasional di atas, pasangan calon Samahuddin-La Ntau, mencoba menyusun visi-misi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk daerah dan masyarakatnya ke depan.

Visi pasangan Samahuddin-La Ntau antara lain; Mewujudkan Kabupaten Buton Tengah “BERSINAR” (Berbudaya, Religius, Sejahtera, Indah, Amanah dan Berdaya Saing). Sementara misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Buteng yang berbudaya, agamis, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan, meningkatkan pengelolaan pariwisata, dan memajukan budaya Daerah.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan sektor pertanian, perkebunan serta peternakan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi, jaringan komunikasi dan sarana air bersih.
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyiapan tenaga medis yang berkualitas

Sementara jika ditinjau dari rencana program kerja yang coba dilakukan Samahuddin-La Ntau dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut:

1. Berbudaya
 - Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal masyarakat sebagai kekayaan dan kearifan lokal.
 - Membangun masyarakat yang berbasis budaya dan kearifan lokal, baik sebagai masyarakat pertanian maupun masyarakat yang bermukim di daerah pesisir sebagai nelayan atau pembudi daya rumput laut.
 - Menanamkan budaya rasa cinta terhadap lingkungan dan hutan kepada seluruh masyarakat dengan melakukan reboisasi (Penghijauan)

2. Religius

- Penciptaan kultur aparat pemerintahan dan masyarakat Buton Tengah yang berinsan seutuhnya dengan memfungsikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Daerah, pembangunan akhlakul kharimah serta memupuk etos kerja yang baik.
- Menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh anak usia sekolah dari TK sampai SMA/SMK dalam rangka melahirkan generasi yang religious, berkarakter dan berbudaya
- Membangun dan memperbaiki fasilitas tempat-tempat ibadah
- Memberikan insentif kepada perangkat masjid dan perangkat tempat ibadah lainnya.

3. Sejahtera

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang pendidikan
- Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa kategori miskin yang berprestasi dari SD sampai ke perguruan tinggi
- Memberikan beasiswa kepada lulusan terbaik SMA/SMK yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
- Mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) sebagai basis permodalan bagi masyarakat
- Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan dalam membantu dan memfasilitasi perekonomian masyarakat Kabutan Buton Tengah

- Menciptakan dan mencari pasar bagi produk-produk local masyarakat Buton Tengah
- Meluncurkan program kredit lunak “Kasangke” bagi masyarakat Buton Tengah yang suka merantau
- Membangun dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dapur pendataan tenaga kerja terampil bagi generasi mudan dan menciptakan wirausaha baru
- Memberikan tunjangan kinerja Daerah bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) yang besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah
- Memberikan insentif kepada tenaga kerja honorer yang besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan uang Daerah.

4. Indah

- Merevitalisasi seluruh potensi-potensi wisata yang ada di Buton Tengah sehingga menjadi indah dan nyaman untuk dikunjungi
- Membangun kampung sehat dan kampung indah yang diwujudkan dalam bentuk lomba Desa sehat dan Desa asri
- Mewujudkan dan menciptakan rasa nyaman kepada siapa saja yang berkunjung ke wilayah Buton Tengah dengan cara memperbaiki dan membangun seluruh infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta meningkatkan kualitas jalan dalam bentuk pelebaran jalan dan pengaspalan
- Penataan kompleks perkantoran disesuaikan dengan potensi yang ada dimasing-masing Kecamatan

- Membangun Ibu Kota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian
- Membangun salah satu Ibu Kota kecamatan sebagai pusat kota pendidikan
- Membangun Desa yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa

5. Amanah

- Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Government and Clean Governance*)
- Menciptakan iklim pemerintahan yang terbuka dan transparan
- Menumbuhkan kualitas pelayanan pemerintahan yang prima terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain yang bersifat jemput bola.
- Membangun birokrasi yang handal diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima pada masyarakat di bidang kesehatan, dengan meningkatkan infrastruktur jalan dan kualitas medis, menambah kuantitas dokter dan paramedik khususnya di puskesmas

6. Berdaya Saing

- Mewujudkan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat dan para investor yang ingin berinvestasi di Buton Tengah.

- Mempermudah syarat-syarat bagi investor yang ingin berinvestasi di Buton Tengah tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah membumi dalam kehidupan masyarakat dan terpelihara turun temurun.
- Memfasilitasi tenaga kerja yang sudah terampil untuk bekerja ke luar Negeri.
- Menjadikan Kabupaten Buton Tengah sebagai sentra pembudidayaan sapi lokal yang berdaya saing, dan diharapkan dapat mendukung produksi daging sapi Nasional.
- Menjadikan Kabupaten Buton Tengah sebagai sentra pembudidayaan rumput laut.
- Membangun tempat-tempat penampungan ikan hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan nilai tambah bagi nelayan, khususnya ikan yang bernilai ekspor.
- Menciptakan dan menumbuhkan daya saing produk-produk lokal di bidang pertanian jambu mete dan budidaya rumput laut, serta produk UMKM lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Membangun industri pengolahan dan pembuatan bahan bangunan dari sumber daya alam yang tersedia secara berlimpah berupa batu kapur dan bahan galian golongan “C”

Tentu saja visi-misi dan rancangan program kerja di atas memberikan dampak yang tidak sedikit bagi besarnya angka keterpilihan Samahuddin-La Ntau di hadapan para pemilih rasional. Rancangan program kerja yang jelas dan mendetail seperti di atas sangat dibutuhkan bagi berlangsungnya pembangunan di daerah baru mekar seperti Buton Tengah. Hal ini kemudian terkonfirmasi dalam

pernyataan salah satu responden bernama H. Sairu yang merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat kecamatan Lakudo sebagai berikut:

Kalau karena kedekatan, saya sebenarnya lebih dekat dengan pasangan 02 Amal-Saleh karena saya ini orang Lakudo tapi karena sudah membaca program yang mau dibikin di bidang religi-agama sama bapak Samahuddin dan Lantau, saya langsung tertarik. Apalagi mereka itu orang-orang yang kerja keras, banyak prestasi, dikenal banyak orang. Saya jadi lebih cocok untuk coblos mereka.

Seorang kandidat menjual produknya yang bersifat tidak nyata, yang sangat terkait dengan sistem nilai sosial, di dalamnya melekat janji dan harapan akan masa depan pemilih dan terdapat visi yang bersifat atraktif. Kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera dicapai namun bersifat harapan, tetapi hasilnya dapat dinikmati dalam masa jangka waktu ke depan atau sifatnya tidak pasti. Bagi pemilih, untuk memperoleh kepastian harapan intitusi politik tentu dengan mengidentifikasi kualitas suatu produk politik, hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi di antaranya citra partai pengusung, kandidat, ideologi, visi-misi dan track record partai pengusung. Dapat juga dilihat pada track record kandidat yang merujuk pada pengalaman memimpin. Karakteristik personal kandidat merujuk pada latar belakang pendidikan, visi-misi kandidat, suku dan agama kandidat serta kejujuran kandidat yang akan menjadi jualan sebagai nilai produk yang bisa dikampanyekan.³²

5. Memanfaatkan Gerakan Kerelawanan

5.1. Kontribusi Lembaga Adat, Kerukunan dan Tokoh Masyarakat

³² Gun Gun Heriyangto. *Panggung Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 83

Selain mengandalkan kekuatan struktural dan kerjasama tingkat atas, gerakan dan memobilisasi masyarakat akar rumput menjadi sesuatu hal yang cukup menonjol yang mewarnai konstelasi dukungan kepada pasangan Samahuddin-La Ntau. Simpul kekuatan itu mewujud dalam lembaga-lembaga adat yang dipromotori oleh pemangku adat, kerukunan-kerukunan dan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Ditinjau dari persebarannya, di kecamatan Mawasangka terdapat kelompok kerukunan yang mewadahi ribuan anggota seperti Kerukunan Keluarga Wasilomata Balikpapan (KKWB), Lembaga Desa Adat Wasilomata, Kerukunan Keluarga Wambuloli (KKW) se-Indonesia, di kecamatan Gu terdapat Kerukunan Keluarga Bombanawulu, Lembaga Adat Bombana Wulu (Bongkaa Ta'u), di kecamatan Sangia Wambulu juga terdapat lembaga adat yang rutin merayakan upacara kande-kandea setiap tahun pasca lebaran Idul Fitri.

Beberapa lembaga adat dan simpul kerukunan keluarga ini memiliki kontribusi yang tak kalah penting dalam memenangkan pasangan Samahuddin-La Ntau. Kerja-kerja dari kelompok ini diarahkan oleh tim pemenang Samahuddin-La Ntau ke hal-hal yang sifatnya mempengaruhi masyarakat lapisan bawah dengan negosiasi yang lebih persuasif dan menyentuh langsung masyarakat lapisan bawah. Keikutsertaan kelompok ini tidak begitu saja bisa terjalin, melainkan dalam prakteknya para tetua yang tergabung dalam lembaga adat juga memiliki otoritas sendiri dalam menentukan sikap dikarenakan secara moril dan simbolik di tengah-tengah masyarakat yang masih kental memegang tradisi dan budaya, mereka sangat dihormati dan didengarkan petuah-petuhannya sebagai pedoman aturan yang harus dipegang teguh dalam membina kehidupan sehari-hari. Berikut salah satu pengakuan ketua adat desa wasilomata:

“Insaodiini para kamokulano liwu, torosu tafaohatoda masyarakatia depilimie so mekataano liwu, mie mepande'aono adatintomu, mie metaa

mofetingke pugauno kamokula, mie kumao'o bae intaodiini, soano kawu kalateanoa, tamakaa nokuma'ono dua podiu bae adati bae intaodiinia. Samahuddin-La Ntau, ana'i kanai ntoomu, bahitie ntoomu, yoisamiu, andimiu, yoamamiu, andoamo pandea kaintaa, somekataano liwuinia". (kita ini para tetua adat, selalu menyampaikan dan memberitahukan masyarakat setempat agar memilih orang yang akan memperbaiki kampung, orang yang tahu dan menghormati aturan-aturan, orang yang taat nasehat orang tua, orang dekat dengan kita bukan Cuma karena tempatnya tapi dekat juga dari segi perilaku dan adatnya dengan kita. Samahuddin-La Ntau itu adalah anak kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, bapak kita, merekalah yang lebih tahu kita, yang akan memperbaiki kampung kita ini). Ungkapan Boboto, Ketua Adat Desa Wasilomata.

Kekuasaan dapat bersumber antara lain pada kedudukan, kekayaan dan dapat pula bersumber pada kepercayaan. Kedudukan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang karena yang bersangkutan menduduki posisi tadi. Kekayaan yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan biasanya dikaitkan dengan kepemilikan sumber material (sumber daya). Kepercayaan diyakini secara turun temurun oleh masyarakat dapat memberikan keabsahan bagi seseorang untuk memiliki kekuasaan.³³

Kekuasaan yang dihasilkan karena dasar kepercayaan inilah yang menjelaskan tentang posisi strategis para pemangku adat dalam sebuah masyarakat, termasuk yang terjadi di daerah Buton Tengah yang masih menjunjung tinggi kesakralan budaya dan adat istiadat. Masyarakat dalam konteks ini sangat mempercayai bahwa para sesepu pemangku adat adalah orang-orang terhormat yang memiliki pengetahuan lebih yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Karena itulah melalui sumbangsih tokoh-tokoh dan masyarakat adat pasangan Samahuddin-La Ntau banyak terbantu dalam keberhasilannya memenangkan pertarungan pilkada Buton Tengah 2017.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 70

Penghormatan lebih atas pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat mendatangkan kekuasaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault. Ia melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, dimana dia melihat pengetahuan adalah kekuasaan. Dimana dalam konsep diskursus (yaitu berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang berarti pada 1 rentang historis tertentu) sebagai gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan dan diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan berkait dengan pengetahuan. Oleh sebab itu, kekuasaan itu tersebar dan datang dari mana-mana. Kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui penguataannya, melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkannya. Dimana, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha hadir dalam masyarakat karena sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi sosial secara umum.³⁴

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisik kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-mana dan disanaterdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan

³⁴ Michel Foucault. *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta:Gramedia,2000), h. 171

ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.³⁵

5.2.Kiprah Relawan Pemuda SAMATAU

Figur Samahuddin-Lantau familiar dikalangan pemuda Buton Tengah dengan personal branding “*Apande’angko, Pande’a Kanau*” yang berarti saya tahu anda, andapun tahu saya. Dengan kata lain, kita begitu dekat, saling mengetahui dan saling mengenal. Maka terbentuklah istilah “SAMATAU” yang kemudian dijadikan nama barisan relawan pemuda Buton Tengah dalam mengampanyekan ide-ide, gagasan dan visi-misi pembangunan dari pasangan Samahuddin-Lantau.

Istilah relawan (volunteer) dalam historiografi politik dikembangkan semenjak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Tugasnya adalah mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan altruistik untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman “aktivismus” yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Bukan hanya pemikiran, tetapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran tersebut disebut “aktivisme”. Aktivismus ini merupakan bagian dari ekspresionisme, yang saat itu memiliki nilai politik sangat kuat. Biasanya *aktivismus* dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi *Neuer Club* yang menaungi para penyair ekspresionis awal; maupun Franz Pfemfert, pendiri majalah *Die Aktion* pada 1911 yang sangat

³⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 60

politis. Dalam berbagai pengertian itu, kaum militan maupun *aktivismus* akhirnya dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (*volunteer*).

Kehadiran relawan politik pemuda SAMATAU sepertinya melampaui kepentingan politik segelintir oknum yang bersifat sesat sebab pada kontestasi pilkada Buton Tengah kali ini, relawan pemuda bukan bagian dari anggota partai politik. Para relawan hadir bukan karena daya tarik partai politik, melainkan kepada politik nilai yang melampaui kepentingan partai. Meski demikian, kehadiran relawan politik dapat disinergikan dengan tim sukses pemenangan kampanye sebuah partai politik-karena fungsi mobilisasi yang lebih masif.

Kiprah dan kerja-kerja relawan pemuda SAMATAU banyak diarahkan kepada intervensi kelompok pemilih milenial dan pemula dengan menggunakan pendekatan program dan aksi sosial bersama melibatkan, memberikan pengarahan dan pendidikan politik dengan sering-sering mengorganisir kelompok-kelompok pemuda, komunitas-komunitas, geng-geng perkumpulan yang terbagi berdasarkan lingkungan dan kompleks tempat tinggal.

Dalam pengarahan, pengorganisir dan pendidikan politik yang dilakukan relawan SAMATAU sering kali diselipkan dengan sosialisasi program kerja dan visi-misi dari pasangan Samahuddin-La Ntau. Pada kesempatan yang sama, branding personal Samahuddin-Lantau tentu menjadi bahan pembicaraan yang saling dipertukarkan disela-sela proses komunikasi dan interaksi antar mereka dengan para pemuda lainnya. Respon milenial didapati cukup beragam dan hangat dengan isu-isu pembangunan sumber daya manusia yang bersifat jangka panjang. Ketimbang memikirkan soal pilihan politik sesaat dan terjebak di dalamnya, mereka lebih asyik dan nyambung untuk berbicara soal proyeksi pembangunan daerah ke depan. Tak jarang kemudian didapati sebagian pemuda yang sudah melek politik dan cukup kritis menanggapi memanasnya tendensi

kepentingan di tahun politik (masa pemilihan). Hal itu ditandai dari pengakuan

“AF” ketua tim relawan pemuda SAMATAU antara lain:

Menghadapi generasi milenial harus punya gaya dan metode tersendiri. Paling tidak apa yang kita lakukan harus mengikuti ritme pemikiran pemuda milenial yang relatif lebih kaya akan wacana-wacana pembangunan yang berkemajuan. Ragam pendekatan juga perlu diterapkan untuk menghadapi kecenderungan pemuda yang berpikirnya kadang juga pragmatis. Tapi lebih dari itu, kita berhasil mensosialisasikan gagasan dan ide pembangunan dari kandidat kami dan diterima pula dengan baik oleh kebanyakan pemuda.

Keuntungan ini tak lupa dimanfaatkan baik-baik dengan mengakomodir dan menyerap aspirasi generasi milenial dengan cara dan pendekatan, program-program yang sesuai kebutuhan lagi disenangi oleh generasi milenial. Kampanye pendidikan politik disertai sosialisasi program yang rutin dilakukan oleh relawan pemuda SAMATAU memberikan hasil yang signifikan bagi akumulasi keterpilhan pasangan Samahuddin-La Ntau.

6. Polarisasi Isu dan Datangnya Legitimasi Kekuasaan

a. Penggiringan Wacana “Putra Daerah”

Wacana dan tendensi politik identitas dengan jargon “Putra Daerah” di kalangan masyarakat, makin menguat bersamaan dengan dikeluarkannya pengumuman oleh KPUD Buton Tengah yang menyebutkan nama Samahuddin-Lantau sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang akan maju bertarung pada pilkada Buton Tengah tahun 2017. Wacana dan tendensi ini telah muncul jauh sebelum pasangan Samahuddin-Lantau menjalankan agenda kampanye dan pengorganisiran ke bawah dan perkembangannya cukup luas hampir memenuhi tiap-tiap sudut ruang sosial dan percakapan masyarakat terutama di tiga kecamatan yaitu Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur. Massa publik mempersepsikan

kedua sosok di atas sebagai representasi terbaik yang secara elektoral mewakili dan dianggap bisa mewujudkan aspirasi serta imajinasi bersama mereka akan sebuah cita-cita politik yang hendak diraih dan dimenangkan.

Bagi kita, sebagian besar orang Mawasangka merasa telah diwakili sama bapak Samahuddin-Lantau. Samahuddin asli putra daerah Mawasangka, dia yang tepat mau tidak mau harus kita pilih. Kita percaya dia akan melakukan yang terbaik untuk daerah, ibarat pepatah hujan emas di negeri orang, masih lebih bagus hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baik orang luar tak akan sama dengan orang asli kita, orang asli kita akan lebih tahu dan peduli kepada kita dari pada orang lain. Pernyataan Lajaka salah satu tokoh masyarakat saat diwawancara

Jika diperhatikan, kecenderungan di atas sebenarnya merupakan satu bentuk perlawanan atas hegemoni kekuasaan yang secara elektoral selalu menguntungkan wilayah kecamatan Lakudo, mulai dari penempatan Ibukota Kabupaten, Pjs. Bupati sampai ketua DPRD dipegang oleh mereka yang berasal dari Lakudo. Ditambah lagi, rival yang dihadapi oleh pasangan Samahuddin-Lantau kali ini juga notabenenya adalah orang yang berasal dari Lakudo. Jadi memang terdapat semacam satu perasaan, bayangan (imajinasi kelompok) atau preferensi politik bersama yang secara spontan mengisi mindset berpikir, mengikat dan mengarahkan masyarakat di tiga kecamatan sebagaimana sudah disebutkan, sehingga kompak bersatu, mendukung dan berusaha memenangkan pasangan Samahuddin-Lantau dalam momentum pilkada kali ini, dengan begitu kekalahan politis yang telah mereka alami sebelumnya bisa dibalikan.

Hal yang sama juga didapati dalam masyarakat kecamatan Gu dan Sangia Wambulu, meskipun tidak terpolarisasi sedemikian kencang seperti yang berkembang di kecamatan Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur tapi tetap saja, masyarakat setempat juga merasa perlu untuk mengambil panggung. Apalagi, orang yang mereka tokohkan yakni Lantau, ikut mencalon sebagai wakil bupati yang mendampingi Samahuddin. Maka secara otomatis,

wacana dan penggiringan isu yang sama pun penting dilakukan sebagai bagian dari skema atau strategi *marketing* politik mereka yang utuh dan masif. Berikut pernyataan tokoh pemuda di kecamatan Gu yang tergabung dalam relawan pemuda SAMATAU bernama Zaba:

Sambil mengampanyekan visi-misi dan program kerja SAMATAU, saya juga bersama teman-teman sesekali menyuarakan soal pentingnya mendahulukan dan memilih pemimpin yang berasal dari daerah kita sendiri, karena yang seperti itu juga banyak disenangi oleh orang-orang tua di kecamatan Gu ini. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka jika bapak Lantau orang sekampung dengan mereka berhasil terpilih sebagai wakil bupati.

Secara elektoral, dominasi dukungan yang mengalir dari lima kecamatan di atas sangat menguntungkan posisi Samahuddin-Lantau. Jika diakumulasikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari lima kecamatan ini mencapai sekitar tujuh puluh persen dari total DPT kabupaten Buton Tengah. Jumlah yang sangat besar dan potensial bagi telaknya sebuah kemenangan dalam konteks pemilihan. Alhasil, setelah pleno perhitungan tingkat kabupaten, KPUD Buton Tengah menetapkan perolehan suara pasangan Samahuddin-Lantau sebanyak 27.647, angka ini dominan diperoleh dari kecamatan Gu, Sangia Wambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur.

Praktik politik identitas di Indonesia lebih dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan aktor-aktor lokal yang diartikulasikan melalui pemekaran daerah. Isu yang digunakan oleh para aktor lokal mengenai ketidakadilan pembangunan yang menjadi “*politik bargaining*” yang dikemukakan dalam setiap kesempatan. Namun demikian, ambisi-ambisi para aktor lokal ini dianggap hanya sebagai “*naluri*” untuk memimpin kepentingan

kelompoknya demi tujuan ekonomi-politik. Berbagai hasil studi menjelaskan, bahwa desentralisasi adalah faktor penentu munculnya politik identitas.³⁶

Dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada daerah di era reformasi membuat semakin mantapnya posisi aktor-aktor lokal meraih kekuasaan di arena politik lokal. Tidak hanya itu, praktik politik dimasa desentralisasi menjadikan isu etnisitas; suku, agama, dan golongan sebagai alat legitimasi politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, terutama dimensi politik, ketidakseimbangan perwakilan politik dan stereotip etnis.³⁷ Menurut Sarumpaet, mengemukakan bahwa, komunitas-komunitas yang terbingkai secara struktural dimanfaatkan oleh aktor-aktor lokal untuk mencapai kekuasaan melalui proses politik yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas etnik serta sengaja diciptakan untuk memenangkan pertarungan, terutama pemilihan kepala daerah.

Klinken mengatakan bahwa, kelas penguasa birokrasi lokal yang bercirikan patronal berbasis pada etnis cenderung membangun aliansi dengan kelas menengah lokal, untuk perebutan sumber daya. Praktik politik identitas di supra-desa menunjukkan bahwa hubungan antara kepentingan politik yang diciptakan oleh aktor diakuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya yang melibatkan aktor-aktor politik, baik itu dalam penguasaan aset-aset sumber daya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan di pedesaan.³⁸

Ada dua hal keunikan yang dimiliki teori Bourdieu antara dikotomi individu dan masyarakat. Selain itu dikotomi antara agen dan struktur, serta

³⁶ Sofyian Sjaf. *Politik Etnik (Dinamika Lokal Di Kendari)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 210

³⁷ Saradi Wantona dkk. *Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo*, (Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol 6 No 1, 2018), h. 81

³⁸ Gerry van Klinken. *Perang Kota Kecil (Perjuangan Komunal Di Indonesia)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 59

kebebasan-determinisme. *Pertama*, teori kunci mengenai habitus, arena dan modal dapat dipakai untuk mengidentifikasi dominasi kekuasaan yang diasumsikan selalu ada dalam masyarakat dengan melacak akumulasi kepemilikan modal dalam masyarakat. *Kedua*, pendekatan yang khas ini menjadi pijakan utama bagi Bourdieu dalam menjelaskan beragam fenomena, atau lebih tepatnya digunakan untuk membongkar dan menganalisis praktik kuasa yang berada dalam berbagai arena politik, budaya dan sebagainya.

Menurut Bourdieu dominasi yang diasumsikan itu tidak hanya mengenai ekonomi saja melainkan adanya dominasi etnik, budaya politik, dan gender di berbagai arena. Arena diartikan sebagai wilayah yang dinamis yang terdapat pertarungan-pertarungan untuk mendapat posisi tertentu. Sedangkan modal dalam pandangan Bourdieu, bukan hanya merujuk pada kepemilikan modal ekonomi semata, melainkan meliputi modal sosial, modal simbolik, modal budaya dan modal ekonomi. Meskipun demikian, definisi modal sangatlah luas dan beragam yang mengacu pada aspek *materil* dan *non materil*, seperti kekayaan, pendidikan, prestise, status, dan kekuasaan.³⁹

Peluang isu ini telah berhasil diidentifikasi tim pemenang SAMATAU, bahwa masyarakat pemilih tradisional sangat *sensitive* dengan isu pengkerdilan tradisi/budaya Daerah yang telah dianggap tabu atau *sacral*. Misalkan mengenai ritual “*bongka ta’u, kamomose, kasebu, kande-kandea, kavelanto*” serta tradisi-tradisi lainnya. Telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Buton Tengah yang harus dijaga dan terus dilestarikan setiap kali tiba masa memperingatinya. Implikasinya jika tradisi ini dikerdilkan atau tidak diberikan perhatian khusus oleh kompetitor, dampaknya adalah mayoritas kelompok pemilih tradisional akan

³⁹ George Ritzer dan Douglas Goodman, Teori Sosiologi Modern (

memberikan sikap antipati terhadap kandidat dengan cara melakukan perlawanan politik dengan tidak memberikan dukungan politik.

Selain dari propaganda isu identitas pelestarian budaya dan tradisi kelompok masyarakat adat, perkembangan isu lain didalamnya termuat antara kandidat putra Daerah dan bukan putra Daerah asli, siapa yang paham bahasa Daerah dan yang tidak paham bahasa Daerah (pancana), serta personal kandidat yang memiliki latar belakang buruk. Propaganda isu identitas calon yang bukan putra Daerah, serta yang tidak memahami dan fasih dalam bahasa daerah dialamatkan pada pasangan petahana (AMAL-SALEH).

b. Personal Branding “Bersahabat dan Merakyat” Dengan Cara Blusukan

Sosok bersahabat dan merakyat merupakan buah dan implikasi dari *personal branding* seseorang yang berhasil dibangun. *Personal branding* disini mengarah pada upaya sadar dan cerdas untuk membentuk citra atau menampakan diri di hadapan para pemilih atau konstituen. *Personal branding* biasanya dibentuk sesuai dengan preferensi atau animo yang disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, *personal branding* diterjemahkan sebagai proses terencana di mana orang melakukan upaya untuk memasarkan diri dalam menciptakan kepercayaan publik.

Proses di atas melibatkan tiga fase; Pertama membangun identitas merek, kompetitor harus membedakan produk yang dipasarkan dengan pesaing sambil menyesuaikan harapan pasar yang telah dikelompokkan. Kedua, mengembangkan positioning merek dengan mengembangkan komunikasi aktif identitas merek seseorang melalui pengelolaan perilaku, komunikasi, dan simbolisme. Ketiga, mengevaluasi citra merek dan untuk memenuhi tujuan pribadi dan profesional.

Individu yang terlibat dalam pembentukan *personal branding* mengembangkan sumber daya manusia mereka dengan berinvestasi dalam pembelajaran berkelanjutan; meningkatkan modal sosial mereka melalui visibilitas dan kemasyhuran.

Dalam prakteknya, Pasangan Samahuddin-La Ntau menggunakan strategi blusukan dengan sehingga terbentuk citra yang dinilai oleh masyarakat Buton Tengah sebagai figur yang sangat bersahabat dan merakyat. Fenomena strategi blusukan telah menjadi salah satu langkah strategis dalam perkembangan politik di tanah air, hal ini juga berdampak di daerah-daerah. Cara ini di ranah politik nasional dipopulerkan oleh presiden Jokowi saat maju mencalonkan diri pada pilgub 2012 melawan petahana Fauzi Bowo. Jokowi yang di usung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggunakan strategi blusukan untuk membentuk citra politik pasangan calon dan institusi politik. Dengan asumsi Jokowi-Ahok adalah figure yang tidak memiliki batasan terhadap masyarakat, figure yang dapat melihat serta mendengar preferensi masyarakat secara langsung, serta figure yang mewakili seluruh kepentingan pemilih.

Bermodalkan pengalaman partai politik penguasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan modal sosial yang dimiliki pasangan SAMATAU, metode blusukan pun menjadi salah satu poin penting untuk diterapkan dalam membentuk citra politik di Buton Tengah. Apalagi ditopang dengan karakter mayoritas pemilih tradisional yang mengharuskan untuk dikunjungi dan bercerita secara langsung mengenai keluhan yang dirasakan pemilih. Poin penting dari metode ini yakni sebagai bentuk penciptaan persepsi positif terhadap apa yang dilakukan pasangan calon kepada pemilih. Pada sisi lain, sebagai bentuk pembangunan hubungan emosional antara pasangan SAMATAU dengan kelompok pemilih Buton Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Keterkaitan antara modal dan kekuasaan politik sangatlah erat. Modal tanpa kekuasaan politik, berarti kehilangan daya signifikansinya untuk memaksimalkan segenap potensi untuk berdaulat. Sementara kekuasaan politik tak akan pernah dapat diraih tanpa adanya modal. Modal dalam politik dibagi ke dalam beberapa hal antara lain; ekonomi, sosial, kultural, simbolik. Semua jenis modal ini saling terhubung dan menopang satu sama lain. Keberhasilan memanfaatkan dan mengkonversikan modal tersebut dengan kekuasaan dapat berujung pada terwujudnya keamanan kekuasaan politik seorang, kelompok maupun sebuah lembaga atau institusi tertentu. Hal inilah yang menjelaskan tentang keberhasilan pasangan Samahuddin-Lantau dalam memenangkan kontestasi pilkada Buton Tengah tahun 2017 lalu.
2. Dikarenakan kompleksitas permasalahan yang didapati saat mengkonversikan modal dengan kekuasaan politik maka diperlukan sebuah kemampuan atau keterampilan kepemimpinan yang memadai. Benar bahwa keberadaan modal yang satu dengan lainnya saling menopang tetapi dalam pemanfaatannya tidak semua menggunakan cara dan pendekatan yang sama. Harus disesuaikan dengan kebermanfaatan setiap jenis modal sehingga bisa diakui dan diterima

dengan baik oleh masyarakat. Dengan kata lain, mesti ada setting kondisi, konteks dan situasi sosial tertentu, supaya kebermanfaatan modal bisa mendatangkan legitimasi kekuasaan politik.

B. Implikasi Penelitian

Terciptanya relasi kuasa yang diperkuat oleh kepemilikan modal politik pada dasarnya merupakan sesuatu yang relatif mudah ditemui dalam praktek politik maupun dalam hubungan keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekarang ini. Relasi kuasa yang demikian kuat dan cepat berkembang di tengah-tengah masyarakat karena adanya investasi dan pengejewantahan kepemilikan modal politik, memang sangatlah menguntungkan sebab bisa menghasilkan sebuah tatanan politik atau pemerintahan yang stabil, hampir tanpa gangguan. Akan tetapi di sisi lain, kemapanan dan kestabilan cenderung lebih mudah dan dekat dengan wajah pemerintahan yang “otoritarianisme” atau kesewenang-wenangan dari pemilik kuasa. Dalam kondisi ini, diperlukan usaha bersama antara pemilik kuasa dengan masyarakat yang menerima baik dan turut melanggengkan pengaruh itu agar bisa selain menjadi objek juga harus bisa bertindak sebagai subjek yang bebas menjaga nilai dan mempertahankan kondisi sosial agar tetap kondusif bagi keberlangsungan hidup semua kalangan tanpa kecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Aedil. Skripsi yang Berjudul, *“Elit Berkuasa dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Kuasa Antara Pemerintah Takalar dengan Karaeng Galesong)*. Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Alfian, M. Alfian. *Menjadi Pemimpin Politik : Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjal al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits: Shahih Muslim 2*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Field, John. *Terj. Modal Sosial*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2010.
- Firmanzah. Persaingan, *Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Halim, Abdul. *Politik Lokal (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Jakarta : LP2B, 2014.
- Harker, Richard dkk. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Haryatmoko. *“Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu : Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa”*. Jurnal/Majalah BASIS, No. 11-12 (November-Desember 2003).
- Hidayat, Sarip. Teori Sosial Bourdieu dan Sumbangannya Terhadap Penelitian Sastra, Jurnal Penelitian Sastra, Vol. 3 No. 1 (2010). <http://ejournalbalai bahasa.id/index.php/metasastra/> (diakses 20 Mei 2019)
- Irfani, Fadil Rahmat. Skripsi yang Berjudul, *“Modalitas Kekuasaan (Studi Terhadap Kepemimpinan Desa Wage Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo”*, Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004.
- Khaldum, Ibnu. Skripsi yang Berjudul, *“Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni – Muh. Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015)”*, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Kridinanto, Nanang. "*Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai*", Jurnal KANAL, Vol. 2 No. 2 (Maret 2014). <http://digilib.uinsby.ac.id/15436/5/Bab%202.pdf>. (diakses 28 Mei 2019).
- Nurcholis, Ahmad. Skripsi yang Berjudul, "*Orang Kuat dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus : Kekuasaan Politik Fuad Amin di Bangkalan)*". Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nurhadi. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Bantul : Kreasi Wacana, 2016
- Raco, J.r. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ria, Irene dkk. *Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemenengan Caleg Pasca Pindah Dapil pada Pileg Kota Surabaya Tahun 2014*. (Jurnal Fak. Sospol Universitas Udayana). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politica/article/download/37666/22852> (diakses 27 Mei 2019).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Jalasutra, 2009.
- Sumarno, dkk. "*Orientasi Modal Sosial dan Modal Kultural di Fakultas Ilmu Pendidikan U.N.Y.*", Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 2 (September, 2013).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.